TINDAK LANJUT

Pengadilan Agama Pariaman

NOMOR ST :W3-A/1567/PS.00/VI/2022
TANGGAL :1 Juli 2022

TAHUN 2022

Manajemen Peradilan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Pengadilan Agama Pariaman telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim tahun 2022, namun di dalamnya belum memuat Majelis khusus yang menangani Perkara Ekonomi Syariah. **REKOMENDASI** • Agar Pengadilan Agama Pariaman segera menerbitkan SK tentang Susunan Majelis Khusus tahun 2022.	• Sudah ditindaklajuti dengan adanya penerbitan Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim tahun 2022 yang didalamnya dimuat Majelis khusus yang menangani Perkara Ekonomi Syariah
2	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Hakim Pengawas Bidang PA. Pariaman telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK. Nomor W3-A2/535.b/OT.01.3/II/2022, tanggal 18 Februari 2022. salah satu konsiderannya mengadakan pengawasan setiap bulan. dan hasil pengawasan telah dilaporkan ke Wakil Ketua dan oleh wakil ketua telah ditindaklanjuti hasil temuan tersebut. Namun Wakil Ketua belum melaporkan LHP dan TLHPnya kepada Ketua PA. Seharusnya Wakil Ketua melaporkannya dan selanjutnya Ketua meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. **REKOMENDASI** • Laporan Hawasbid Tri Wulan 1 segera dikirim ke	• Sudah ditindaklanjuti dengan Wakil Ketua telah melaporkan LHP dan TLHP kepada Ketua PA dan Ketua PA telah meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

		Pta. Padang.	
3	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Pimpinan belum menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembagian dan Penetapan tugas dan tanggung jawab secara jelas, seharusnya telah terbit. **REKOMENDASI** • Agar pimpinan sesegeranya menerbitkan SK tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pada Pengadilan Agama Pariaman.	• Sudah ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang pembagian dan penetapan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua dan Ketua PA Pariaman secara jelas.

AdministrasiPerkara

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);1. Penginputan Data Penundaan Sidang Setiap Penundaan Sidang telah diinput ke SIPP.pada hari sidang ditunda oleh Panitera Pengganti;.2. Upload Relaas Panggilan;- Setiap relaas panggilan telah diupload ke SIPP sebelum hari sidang oleh Jurusita / Jurusita Pengganti;.3. Upload BAS;- Masih ada BAS yang belum diupload ke SIPP. Oleh Panitera Pengganti (Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm sidang Tanggal 23 Mei 2022 dan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm sidang Tanggal 30 Maret 2022) **REKOMENDASI** • 1. Panitera Pengganti segera mengupload BAS	• Sudah ditindaklanjuti dengan mengupload BAS ke SIPP pada perkara nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm dan 241/Pdt.G/2022/PA.Prm

		yang telah selesai sidang ke SIPP;2. Panitera harus sering memonitoring menu BAS yang telah selesai sidang oleh Panitera Pengganti, apakah sudah diupload ke SIPP;	
2	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • E-Doc Arsip/Alih Media Arsip;Masih ada berkas perkara yang telah minut dan BHT belum dialih Mediakan ke SIPP yaitu : 1. Perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm putus tanggal 11 April 2022 diserahkan oleh PP ke Petugas Arsip tanggal 3 Mei 2022; 2. Perkara Nomor 311/G/2022/PA.Prm putus tanggal 5 April 2022 belum diserahkan oleh PP ke Petugas Arsip; 3. Perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm putus cabut tanggal 12 April 2022 dan diserahkan kepada Petugas Arsip tanggal 3 Juni 2022;4. Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Prm putus tanggal 19 April 2022 dan telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 11 Mei 2022 dan diserahkan kepada Petugas Arsip tanggal 3 Juni 2022); **REKOMENDASI** • Pembinaan dan Pengawasan oleh pimpinan;	• Sudah ditindaklanjuti dengan mengalih media dan mengupload arsip perkaranomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm, 311/Pdt.G/2022/PA.Prm, 366/Pdt.G/2022/PA.Prm, 386/Pdt.G/2022/PA.Prm ke SIPP.
3	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • E- Keuangan Perkara Saldo Uang ATK Saldo Keuangan ATK Perkara tidak balance dengan sisa perkara yaitu sampai	• Sudah ditindaklanjuti dengan membelanjakan uang ATK yang berlebih.

		tanggal 6 Juni 2022 sisa perkara 108, seharusnya saldo Rp5.400.000,00, dalam pemeriksaan saldo Rp12.155.000,00. **REKOMENDASI** • Panitera sebagai Penanggung Jawab Pengelola ATK perkara harus sering melakukan monitoring terhadap keuangan ATK perkara dengan sisa perkara, untuk segera membelanjakan biaya proses yang dipungut tersebut agar tidak terlalu jauh selisih antara sisa perkara dengan keuangan ATK perkara;	
4	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Saldo HHK dan HHKL Setiap uang HHK dan HHKL telah disetorkan ke Kas Negara. Kemudian masih ada penambahan pajar biaya perkara setelah perkara putus (perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm. dan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm.); **REKOMENDASI** • Seharusnya Panitera Pengganti mencek ke Kasir biaya perkara yang akan diputus sebelum persidangan;	• Sudah disosialisasikan kepada Majelis Hakim, Panitera, dan Kasir untuk setiap perkara yang kurang panjarnya untuk ditambahkan terlebih dahulu sebelum perkara putus.

Administrasi Persidangan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut, ditemukan: 1.	• Sudah ditindaklanjuti dengan mengubah PHS dengan mengganti pada kata-kata Jurusita/Jurusita

		Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, sementara yang ditunjuk oleh Panitera adalah Jurusita. dan ada perintah ..... bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti ....,,, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang; 2.Ada Pergantian Majelis (PMH baru) Namun dasar pergantiannya adalah tanggal saat dikeluarkannnya PMH baru tersebut, seharusnya tanggal PMH Awal. **REKOMENDASI** • Untuk menjadi perhatian dalam Pembuatan PHS dan PMH (Pergantian Majelis Hakim)	Pengganti menjadi Jurusita dan sudah melakukan perubahan pada tanggalnya yang semula tanggal saat dikeluarkan PMH baru tersebut menjadi tanggal PMH awal.
2	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm. . Dalam berkas tersebut, ditemukan: Pada BAS Pertama tertulis Susunan Persidangan 1. 2... dan 3... bila dicocokkan dengan PMH tidak sama Majelis Hakimnya dan kalaupun ada pergantian Majelis Hakim, seharusnya ada PMH baru. tetapi dilihat pada BAS dan Putusan yang menandatanganinya adalah Majelis Hakim sesuai dengan PMH Awal. **REKOMENDASI** • Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus teliti dalam memeriksa dan menandatangani Berita	• Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan susunan majelis pada BAS perkara nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm

		Acara Sidang.	
3	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Perkara Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan: 1. Perkara tersebut adalah perkara E Court. salah satu konsiderannya dalam PMH tertulis ... Susunan Majelis Hakim Tahun 2021, sementara SK Susunan Majelis Hakim Tahun 2022 sudah terbit, seharusnya SK Susunan Majelis Hakim Tahun 2022. 2. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, senyatanya adalah Juru Sita Pengganti, Sepert halnya dalam Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera. dan ada perintah ..... bahwa kepada Para pihak untuk membawa bukti-bukti ....,,, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang tersebut. Dalam hal ini, andaikan Tergugat hadir dengan menyerahkan jawaban, begitupula kalau Penggugat hadir dengan dengan mengajukan bukti-buktinya, bagaimana dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu supaya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu; 3. Akta Cerai terbit tanggal 25 Maret 2022, sementara perkara tersebut BHT nya tanggal 8 Maret 2022. Tabayyun ke PA. Padang. **REKOMENDASI** • 1. Agar blanko PMH	• Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada PHS perkara nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm.

		perkara E Court disesuaikan dengan Susunan Majelis yang terbaru dan Blanko PHS dibuat sesuai dengan ketentuan, atau kalau perlu kalimat di atas didelet saja. Kecuali kalau perkaranya bersifat Volunter; 2. Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Supaya tidak terlambat terbitnya Akta Cerai, Panitera membuat surat ke PA. tersebut (PA. Padang) dan kalau diperlukan ditembuskan ke PTA.	
4	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm. . Dalam berkas tersebut ditemukan : 1. Pada BAS Pertama ada pernyataan tentang Penjelasan Mediasi dan Penunjukan Mediator. Dalam hal tersebut ada zig zag, namun tidak ada paraf. Seharusnya ada paraf .2. Dalam putusan ada amar tentang hak asuh anak dan nafkah anak, namun tidak ada bukti tentang Akta Kelahiran. **REKOMENDASI** • 1. Ketua Majelis dan Panitera Pengganti harus menjadi perhatian dalam hal ketentuan tentang adanya zig zag. 2. Majelis Hakim dalam mengabulkan hak auh anak dan nafkah anak hendaknya didukung dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta	• Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan berupa pemberian paraf dan sc setelah zig zag pada BAS Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm

		Kelahiran.	
5	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan : 1. Status Penggugat adalah PNS, namun dalam berkas yang diminutasi tidak dimasukkan Surat Izin dari atasan., 2. Dalam BAS tidak ada tertuang tentang adanya Surat Izin atasan tersebut dan dalam Putusan tidak dipertimbangkan. Dan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut ditemukan Surat Izin dari atasan, namun tidak dituangkan dalam BAS dan tidak juga dipertimbangkan dalam Putusan. **REKOMENDASI** • Agar Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa pihak berperkara yang berstatus PNS sebelum memeriksa pokok perkara harus memeriksa surat izin dari atasan terlebih dahulu, dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAS dan dipertimbangkan dalam Putusan.	• Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan memasukan surat izin atasan kedalam BAS dan memasukan surat izin tersebut kedalam berkas.

Administrasi Umum

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Aplikasi E-Bima tahun 2021 belum diisi lengkap dan tahun 2022 belum diisi	• Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi data-data yang belum lengkap

		REKOMENDASI • Agar Kuasa Pengguna Anggaran segera menunjuk operator khusus E-Bima, karena pengawasan Aplikasi E-Bima dimonitor oleh YM.Ketua Mahkamah AGung RI dan Sekretaris MA RI	
2	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan beserta data dukung yang belum terjilid rapi **REKOMENDASI** • Diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk merevisi Pagu Penjilitan agar dapat digunakan untuk kegiatan penjilitan selanjutnta	• Sudah ditindaklanjuti dengan menjilid Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan
3	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • 1. Dokuemen pertanggungjawaban belum disusun rapi (dapat dilihata dikriteria)2. Kuitansi pemeliharaan kendaraan dinas pada bulan Mei 2022 belum ditandatangani oleh Penanggungjawab kendaraan3. Spd halaman 2 pada belum ditanda tangani PPK4. Pada lembar kuitansi belum ditanda tangani pejabat penerima hasil5. Pada kuitansi daya dan jasa belum dibubuhkan tanda tangan bendahara, ppk dan penerima hasil6. Pada kuitansi bantuan sewa rumah dinas , dengan nilai diatas Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) belum ditemukan pembayaran PPN 7. Pada kuitansi rumah dinas yang di data NPWP ditulis	• Selah disusun berdasarkan kriteria :GUPSP2D-SPM-SPP-DRPP-SPBy-Kuitansi-Nota-SSPajak

		NPWP hakim seharusnya NPWP pemilik rumah jika tidak ada NPWP satuan kerja.8. Kuitansi pengadaan atk dan pemeliharaan peralatan mesin yang dicetak oleh sakti tertera nama pegawai, seharusnya nama pemilik toko atau bengkel yang bersangkutan **REKOMENDASI** • 1. Pengelola Keuangan dan Bendahara senantiasa melaksanaakan rapat koordinasi setiap awal bulan terkait permasalahan dan hal penting dalam pengeloaan administrasi dan oertanggugjawaban keuangan 2. Untuk perjalanan dinas agar memperhatikan PMK nomor 113 tahun 2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 22 Tahun 20132. Pengelola Keuangan DIPA dan Bendahara agar mempedomani PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
4	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • 1. Masih ada pejabat/pegawai yang presensi online di luar kantor 2. Penginputan ketidakhadiran pegawai pada profil pegawai baru dimulai pada bulan mei 2022 3. Mesin presensi elektronik rusak pada bagian nama pegawai, 4. Masih ada pegawai yang	• Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan himbauan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk dapat melakukan presensi online didalam kantor dan telah dilaksanakan. Serta pembuatan berita acara jika terdapat eror dalam

		tidak mengisi preensi online ataupun manual **REKOMENDASI** • 1. Perlu dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait presensi 2. Pegawai yang tidak mengisi presensi online karena ketergagngguan jariangan, melaporkan diri kepada bagian kepegawaian dan selanjutnya bagian kepegawaian membuat surat pernyataan dari Ketua Pengadilan dengan mencantumkan eviden kehadiran pegawai yang bersangkutan berdasarkan mesin presensi elektronik atau absen manual yang menunjukkan pegawai yang bersangkutan tidak terlambat. Presensi online tidak diisi . 3. Mesin presensi elektronik yang rusak agar diperbauki atau mengajukan pengadaan baru	absensi online.
5	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Masih ada PKP mulai bulan Pebruari 2022 sampai bulan mei 2022 belum ditanda tangani atasan langsung **REKOMENDASI** • Agar segera di tanda tangani oleh atasan langsung	• Sudah ditindaklanjuti penanda tanganan PKP bulan Februari – Mei 2022 oleh atasan langsung.
6	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Belum menetapkan hps pada pengadaan genset **REKOMENDASI** • Agar PPK secepatnya mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengadaan barang dan	• Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan hps pada pengadaan genset.

		jasa untuk pengadaan genset.	
7	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Pada tanggal 06-06-2022, Lembar Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) belum ditanda tangani oleh Atasan Langsung mulai bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2022 **REKOMENDASI** •	• Sudah ditindaklanjuti penanda tanganan PKP bulan Februari – Mei 2022 oleh atasan langsung.
8	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • masih ada Tender /pengadaan belum dilaksanakan **REKOMENDASI** • Agar dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk segera dilaksanakan pengadaanya. Untuk tahap persiapan diawal tahun KPA dan PPK melalui rapat bersama dengan pimpinan menentukan jadwal pengadaan , dan jika terjadi kendala maka senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi, yang dilengkapi dengan undangan rapat, daftar hadir , notulen hasil rapat dan dokumentasi. Sehingga akan ditemukan jalan keluar penyelesaian kendalanya.	• Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan tender yang belum dilaksanakan
9	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • 1. Laporan Keuangan, Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa. belum update (posisi tanggal 6-6-2022) 2. Renstra pada Bab IV	• Sudah di perbaiki dengan mengupdate laporan keuangan, daftar asset dan inventaris serta informasi pengadaan barang dan jasa pada website Pengadilan

		belum diuplod **REKOMENDASI** • Agar Petugas seger mengupdate Laporan keuangan , daftar aset dan inventaris , informasi pengadaan batang dan jasa dan Rsnstra Bab IV pada website	Agama Pariaman.
10	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Evaluasi PPNPN triwulan I belum dilaksanakan **REKOMENDASI** • Agar Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan evaluai PPN{PN untuk triwulan II ini pada bulan JUni 2022	• Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan evaluasi PPNPN.
11	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Masih ada Daftar Inventaris Barang yang belum diupdate sesuai dengan kondisi barang dalam ruangan **REKOMENDASI** • Agar petugas BMN senantiasa mengupdate jika terjadi perubahan BMN pada suatu ruangan	• DBR sudah diupdate sesuai dengan kondisi barang dalam ruangan.
12	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • 1. Aset pada DBR pustaka tidak sesuai dengan kondisi di ruang pustaka, ada beberpa aset yang sudah dipindahkan seperti meja dan kursi. 2. Aplikasi SLIM baru mulai dikerjakan **REKOMENDASI** • Agar dilengkapi kembali aset diruangan tersebut	• Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaharui DBR yang sesuai dengan kondisi di ruang pustaka.
13	**Status** SUDAH	**KONDISI** • SOP Pengelolaan Biaya	• Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP

	Target Penyelesaian 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	Proses/ATK Perkara Pembebasan Perkara belum dibuat **REKOMENDASI** • 1.Segera melakukan reviu SOP 2. Segera melengkapi surat tugas jurusita oleh Panitera 3. Segera melaksanakan pencairan ATK perkara Prodeonya 4. Segera lengkapi pertanggungjawaban SPDnya	Pengelolaan Biaya ATK Perkara Pembebasan biaya.

KinerjaPelayanan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Pada Ruangan Arsip Perkara, ditemukan Berkas Nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm. Putus tanggal 12 April 2022. Minutasi dan Aplaud Putusan pada tanggal yang sama, namun diserahkan ke Petugas Arsip tanggal 27 Mei 2022 (ekspedisi penyerahan berkas ke Petugas Arsip) **REKOMENDASI** • Panitera Pengganti harus segera menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke Petugas Arsip untuk diarsipkan.	• Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan berkas perkara Nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm kepada petugas arsip dan berkas telah diarsipkan. Berkas perkara nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm juga telah dialih mediakan serta diupload ke dalam SIPP.
2	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Layanan Pos Bakum - Belum tersedia dengan lengkap Ruang Pelayanan Pos Bakum , kelengkapan Administrasi (seperti Struktur Pos Bakum, instrumen, register kemudian ruangan Pos Bakum masih bergabung dengan gugatan mandiri;	• Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan administrasi POSBAKUM berupa Struktur POSBAKUM; Instrumen; Buku Register.

		REKOMENDASI • Pimpinan memberikan arahan dan pembinaan kepada petugas serta melakukan croscek tentang kelengkapan administrasi pos bakum	
3	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Keadaan Ruang Arsip.1. Fisik Berkas pada Ruang ArsipPisik berkas sudah tertata dengan rapi dalam bok sesuai buku II. Akan tetapi belum punya filling Kabinet (Lemari Arsip) untuk menyimpan arsip;2. Keadaan Ruang ArsipRuang arsip sudah rapi dan agar ditingkatkan kebersihannya; **REKOMENDASI** • Agar Pimpinan setiap tahun mengusulkan ke PTA. Paang tentang anggaran pengadaan filling kabinet tersebut;	• Sudah dilakukan pengajuan filling cabinet (Lemari Arsip) dan meningkatkan kebersihan ruang arsip
4	**Status** SUDAH **Target Penyelesaian** 2022-07-08 **Tanggal Penyelesaian**	**KONDISI** • Akta Cerai yang Belum diambil pihak Masih ada Akta Cerai yang telah diterbitkan belum diambil/diserahkan kepada pihak seperti pada tahun 1995 yaitu 49 lembar tahun 1996 59 lembar dan tahun 1997 yaitu 51 lembar dan banyak lagi sampai tahun 2022 dan masih ditemukan E-Doc Akta Cerai yang belum diinput ke SIPP (Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm.) **REKOMENDASI** • Bagaimana kalau PA. Pariaman berinovasi	• Sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para pihak yang belum mengambil akta cerai tersebut dan E-Doc Akta cerai perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm sudah diupload ke SIPP

		dalam hal ini dengan tidak menapihkan Ketentuan Peraturan berlaku seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.	

Pariaman, 1 Juli 2023
Ketua Pengadilan Agama Pariaman

Yang Ariani, S.Ag.,M.H.
NIP. 197304131998032002

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
TAHUN 2022

A. Manajemen Peradilan

No.	Hasil Temuan	Tindak Lanjut	Bukti
1	Pengadilan Agama Pariaman telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim tahun 2022, namun di dalamnya belum memuat Majelis khusus yang menangani Perkara Ekonomi Syariah	Sudah ditindaklajuti dengan adanya penerbitan Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim tahun 2022 yang didalamnya dimuat Majelis khusus yang menangani Perkara Ekonomi Syariah.	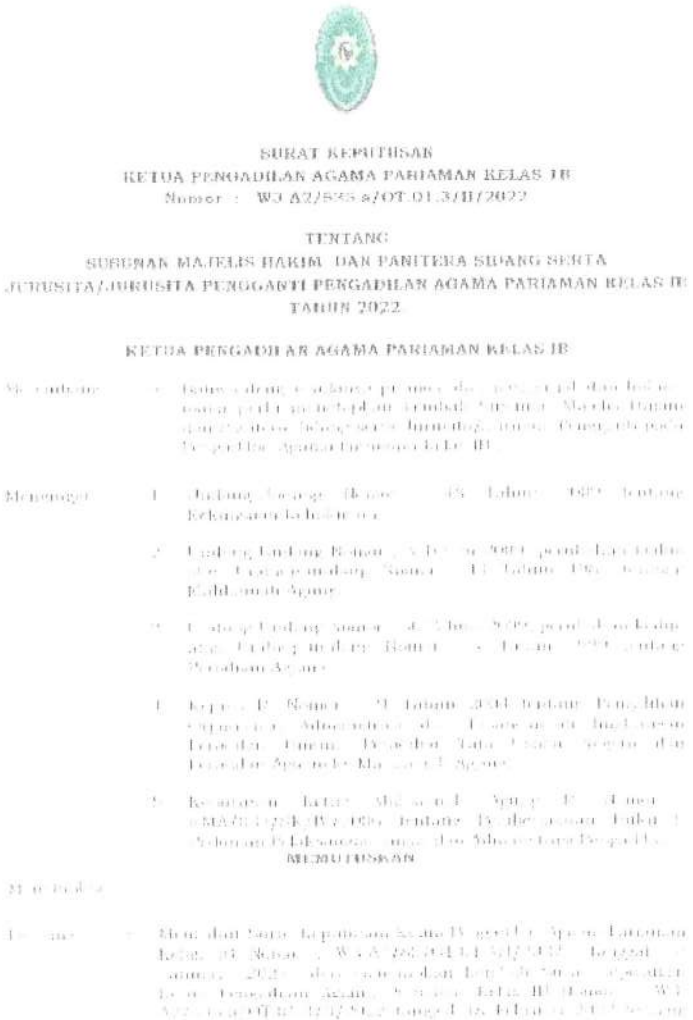 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Nomor : W3-A2/535-a/OT.01.3/II/2022 TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA SIDANG SERTA JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2022 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB MEMUTUSKAN

Susunan Majelis Hakim dan Panitera sidang perkara Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Parigi kelas III tahun 2022 yang susunannya sebagaimana lampiran I surat Tugas ini. Bertugas jawab sebagaimana lampiran II surat keputusan ini;

Kedua : Khusus untuk Perkara Dispensasi Kawin dibebankan dengan biaya tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;

Ketiga : Bahwa dengan Penggantian yang namanya tersebut dalam diktum Kedua lampiran surat keputusan ini disampingi bertugas sesuai Jurusita/Jurusita Pengganti juga sebagai petugas meja sidang sesuai majelis tersebut;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikkan oleh sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 18 Februari 2022

Ketua,

Yang Arfiani, S.Ag., M.H.
NIP. 19730413 199803 2 002

Tembusan:
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Tim Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
NOMOR : W3-A1/[illegible]/HK.01.3/[illegible]/2022 TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA SIDANG SERTA JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2022

NO	HARI SIDANG	MAJELIS HAKIM	KODE	KEDUDUKAN	PANITERA/PP	KODE	RUANG SIDANG	Jurusita/JSP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RABU	1. YANG ARIANI, S. Ag. MH 2. MUCHSIN, SH 3. AFDIZAL RUSMALIZAL, S.H.	A C.1 C.2	KETUA MS. KPS ANGGOTA ANGGOTA	RISWAN, S.H.	1	1	M. ARIF ANWAR	
2		1. ANNEKA YOSHIILMA, S.H., MH 2. Dra. ERMIDA YUSFRI, M. HI 3. SASWALI, SHI, M. H	B C.3 C.4	KETUA MS. KPS ANGGOTA ANGGOTA	FAUZI, S.Ag	1	2	SEPIE NIDIAN	
3	SENIN	1. AMRIZAL, SH 2. M. ZAKOL, SH 3. YUSTI SUKMAWATI, S.H.	C.5 C.1 C.2	KETUA MS. KPS ANGGOTA ANGGOTA	MEIRITA, S.H	2	1	ARIF RAHMAN	
5	SELASA	1. Dra. ERMIDA YUSFRI, M. HI 2. AMRIZAL, SH 3. [illegible]	C.3 C.1 C.2	KETUA MS. KPS ANGGOTA ANGGOTA	1. RAHMAT HUDAYA S.H. 2. YUSRI, B.A.	3 4	1	YUNALDI	
6	KAMIS	1. YANG ARIANI, S. Ag. MH 2. ANNEKA YOSHIILMA, S.H., MH 3. Dra. ERMIDA YUSFRI, M. HI	A B C.3	KETUA MS. KPS ANGGOTA ANGGOTA	RISWAN, S.H.	1	1	M. ARIF ANWAR	Majelis Khusus Ekonomi Syari'ah

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 18 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

Yang Ariani, S.Ag., M.H.
NIP. 19730413 199803 2 002

			mengupload ke SIPP (One Minute) 8. Membantu Mengedarkan surat/surat ke email para pihak bagi perkara litigasi. 9. Melakukan Anonimisasi putusan dan mengupload ke SIPP	
			3. Panitera Pengganti	1. Menyiapkan peralatan persidangan 2. Mencatat putusan dan jalannya persidangan 3. Membuat Berita Acara Sidang dan upload ke SIPP 4. Membantu Ketua Majelis Membuat Instruksi Penggilan/Pemberitahuan serta menyerahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti. 5. Membantu membuat Instruksi Sita/Eksekusi/Materil bagi setiap perkara perdata dan menyerahkan kepada Jusit. 6. Bertindak sebagai Juru Sumpah dipersidangan. 7. Membantu Ketua Majelis Melakukan Minutasi berkas (One Day Minute)
			4. Jurusita/Jurusita Pengganti	1. Membuat relaas Panggilan/Pemberitahuan sesuai perintah Ketua Majelis. 2. Menyampaikan Panggilan/Pemberitahuan kepada para pihak secara patut atas Ketua Majelis. 3. Mengisi tanggal Panggilan dan Upload relaas ke SIPP setelah hari dan tanggal sidang. 4. Ikut mendampingi Majelis dalam pelaksanaan Eksekusi/Pemeriksaan setempat. 5. Bertindak sebagai Pengurus barang sita/eksekusi, jawal yang dibutuhkan. 6. Membantu Panitera Pengganti sebagai Juru Sumpah di persidangan. 7. Membantu Ketua Majelis Melakukan Minutasi berkas (One Day Minute)

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 14 Februari 2022
Panitera Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB

Yang Arjuni, S.Ag., M.H.
NIP. 19730413 199803 2 002

2	Hakim Pengawas Bidang PA. Pariaman telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK. Nomor W3-A2/535.b/OT.01.3/II/2022, tanggal 18 Februari 2022. salah satu konsiderannya mengadakan pengawasan setiap bulan dan hasil pengawasan telah dilaporkan ke Wakil Ketua dan oleh wakil ketua telah ditindaklanjuti hasil temuan tersebut. Namun Wakil Ketua belum melaporkan LHP dan TLHPnya kepada Ketua PA. Seharusnya Wakil Ketua melaporkannya dan selanjutnya Ketua meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.	Sudah ditindaklanjuti dengan Wakil Ketua telah melaporkan LHP dan TLHP kepada Ketua PA dan Ketua PA telah meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.	Laporan Hasil Pengawasan HAWASBID Triwulan I 2022 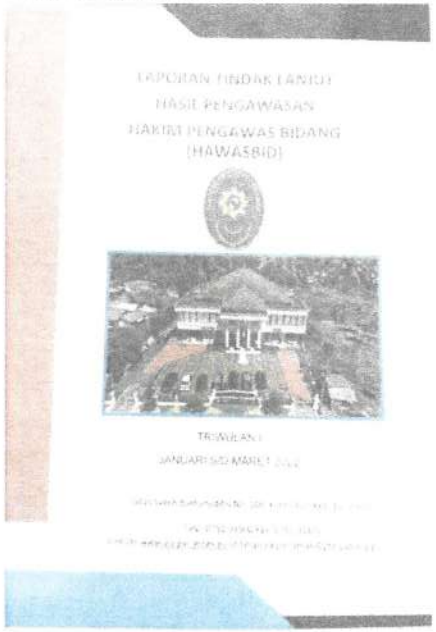 LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) TRIWULAN I JANUARI S/D MARET Surat pengantar pengiriman Laporan Hasil Pengawasan HAWASBID Triwulan I 2022 ke PTA Padang. PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

			Amplop pengiriman Laporan Hasil Pengawasan HAWASBID Triwulan I 2022 ke PTA Padang. 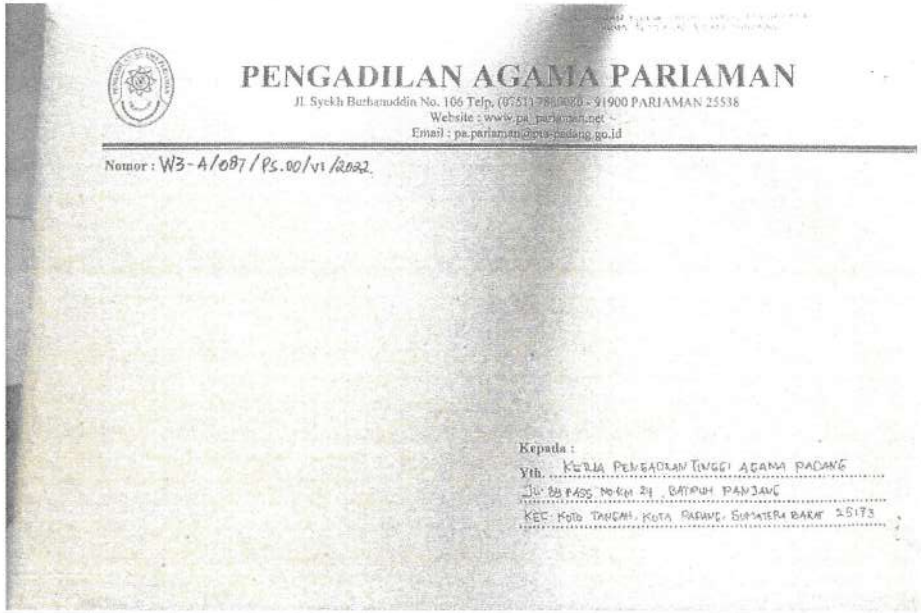 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jl. Syekh Burhanuddin No. 166 Telp. (0751) 7880020 - 91900 PARIAMAN 25538 Website : www.pa-pariaman.net Email : pa.pariaman@pta-padang.go.id Nomor : W3-A/087/Ps.00/VI/2022. Kepada : Yth. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG Jl. Sudirman No. 24 Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25173

3	Pimpinan belum menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembagian dan Penetapan tugas dan tanggung jawab secara jelas, seharusnya telah terbit.	Sudah ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang pembagian dan penetapan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua dan Ketua PA Pariaman secara jelas.	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB NOMOR : W3-A2/102/KP.04.6/1/2022 TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2022 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha menciptakan peradilan yang [illegible] berwibawa dan dihormati perlu dilakukan bersama [illegible] sumber daya manusia, program kerja, organisasi kerja dan pendelegasian tugas dan wewenang antara pimpinan Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB; b. Bahwa [illegible] terselenggaranya dengan baik [illegible] pengawasan dan pelaksanaan tugas pokok peradilan serta administrasi peradilan perlu [illegible] secara konkrit pendelegasian tugas dan wewenang kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159); 3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman dan Pengawasan; 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang [illegible] Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim Peradilan yang [illegible] di Bawahnya; 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Aparat Internal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 0[illegible] Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sistem di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tugas Sekretaris Pengadilan; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri; 10. Surat [illegible] Mahkamah Agung RI [illegible] 2006 [illegible] 11. Hasil [illegible] 12. Hasil konsultasi Pelaksanaan Rumus pola Manajemen dan Kepemimpinan di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 24 Juli 2006 di Jakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2022**

KEDUA : Menetapkan pembagian tugas dan wewenang Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB dalam melaksanakan administrasi dan pengawasan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Melaporkan dan mengkonsultasikan hal-hal yang dipandang perlu kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : [illegible] 2022

Ketua,

YANI ARIANI, S.Ag., M.H.
NIP. 197304151998032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
NOMOR : W3-A2/102/KP.04.6/I/2022 TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

TUGAS-TUGAS YANG DIDELEGASIKAN

NO	UKAIAN TUGAS
1	Bersama sama Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan secara baik dan lancar
2	Menaksanakan tugas tugas Ketua bila Ketua berhalangan
3	Melaksanakan delegasi wewenang Ketua
4	Mewakili Ketua dalam menghadiri pertemuan/undangan dari Pemerintah Kota atau instansi lain, apabila Ketua berhalangan atau sedang dinas luar
5	Mengkoordinir atau memantau pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang
6	Mengevaluasi hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan melaporkan kepada Ketua 1 x 3 bulan
7	Melaporkan seluruh hasil pengawasan kepada Ketua dan bersama Ketua memecahkan persoalan yang timbul atau yang dihadapi serta mencari solusi yang terbaik demi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB
8	Memberikan saran dan usul kepada Ketua tentang hal hal yang dianggap baik untuk kelancaran jalannya kegiatan kantor dan peradilan
9	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai/pejabat Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. Sekaligus sebagai koordinator tindak lanjut hasil pengawasan
10	Sebagai koordinator dalam pembuatan Laporan Tahunan, Program Kerja, Job Description dan laporan-laporan pelaksanaan tugas lainnya sebelum dimakkan kepada ketua untuk ditandatangani
11	Melakukan pembinaan terhadap pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan serta pegawai
12	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga sukarela dan pegawai kontrak dalam pelaksanaan tugasnya
13	Melakukan pengawasan terhadap barang perkara dan titipan pihak ketiga
14	Melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat
15	Menunjuk Hakim untuk membuatkan surat gugatan/permohonan secara lisan bagi yang buta huruf
16	Sebagai koordinator dalam tugas mediator dan menerima laporan mediator dalam perkara yang ditangani 1 x 3 bulan
17	Melakukan pembinaan terhadap tugas mediator 1 x 3 bulan
18	Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah pimpinan (ketua) Pengadilan atau pimpinan Mahkamah Agung RI sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
19	Mengawasi pelaksanaan disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku
20	Mendudukannya surat bagian kepegawaian (cuapan dukcapil)
21	Melakukan tugas lainnya sesuai kebijakan ketua

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
Ketua

YANG ARIANI, S.Ag., M.H.
NIP 19720413 199803 2 001

B. Administrasi Perkara

No.	Hasil Temuan	Tindak Lanjut	Bukti
1	1. Penginputan Data Penundaan Sidang Setiap Penundaan Sidang telah diinput ke SIPP.pada hari sidang ditunda oleh Panitera Pengganti	-	Temuan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;- Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor NOMOR 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.
	2. Upload Relaas Panggilan;- Setiap relaas panggilan telah diupload ke SIPP sebelum hari sidang oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.	-	Temuan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan; Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.
	3. Upload BAS;- Masih ada BAS yang belum diupload ke SIPP. Oleh Panitera Pengganti (Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm sidang Tanggal 23 Mei 2022 dan	Sudah ditindaklanjuti dengan mengupload BAS ke SIPP pada perkara nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm dan 241/Pdt.G/2022/PA.Prm	Screenshoot SIPP perkara nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm.

	Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm sidang Tanggal 30 Maret 2022)		Screenshoot SIPP perkara nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm.

2	1. Perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm putus tanggal 11 April 2022 diserahkan oleh PP ke Petugas Arsip tanggal 3 Mei 2022.	Sudah ditindaklanjuti dengan mengalih media dan mengupload arsip perkara nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm ke SIPP.	Arsip perkara nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. INFORMASI DETAIL ARSIP Kembali Data Arsip Data Peminjaman Edit Data Arsip Nomor Ruang: 01 Nomor Rak/Lemari: 01 Nomor Tingkat/Laci: 04 Nomor Boks: 31 Nomor Arsip: 302 Nomor Perkara: 302/Pdt.G/2022/PA.Prm Tanggal Masuk: 2 Juni 2022 Staff yang Menyerahkan Berkas: MEIRITA, SH Petugas yang Menerima Berkas: Dasnari Status: Ada E-Doc Arsip: [download] Keterangan:

			Isi berkas arsip perkara nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB

	2. Perkara Nomor 311/G/2022/PA.Prm putus tanggal 5 April 2022 belum diserahkan oleh PP ke Petugas Arsip	Sudah ditindaklanjuti dengan mengalih media dan mengupload arsip perkara nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Prm ke SIPP.	Arsip perkara nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. 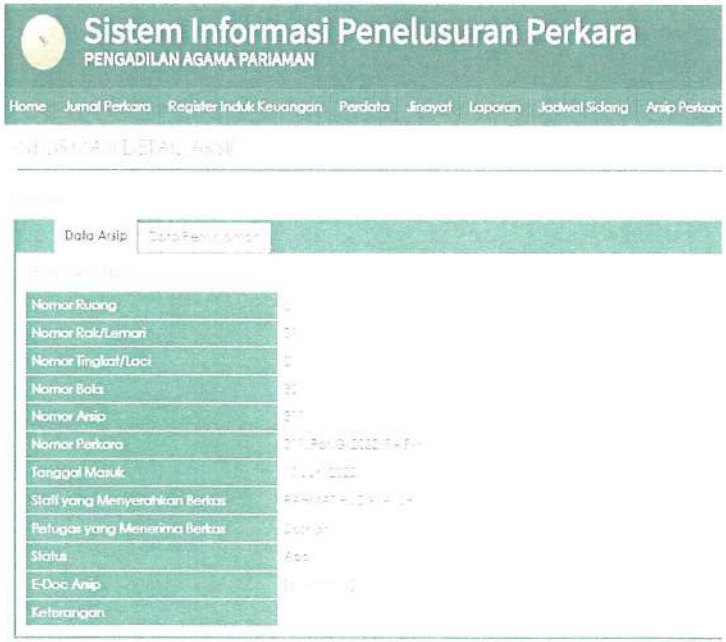 Isi berkas arsip perkara nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. 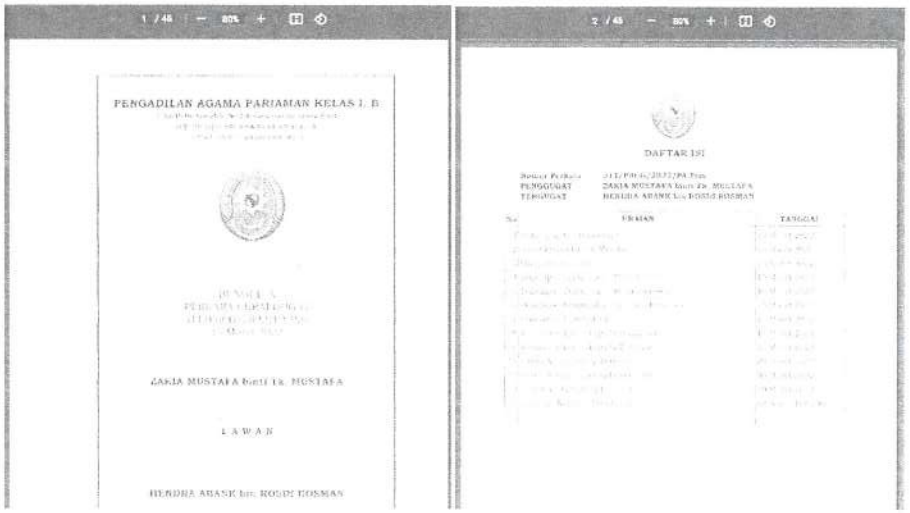

	3. Perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm putus cabut tanggal 12 April 2022 dan diserahkan kepada Petugas Arsip tanggal 3 Juni 2022	Sudah ditindaklanjuti dengan mengalih media dan mengupload arsip perkara nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm ke SIPP.	Arsip perkara nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. 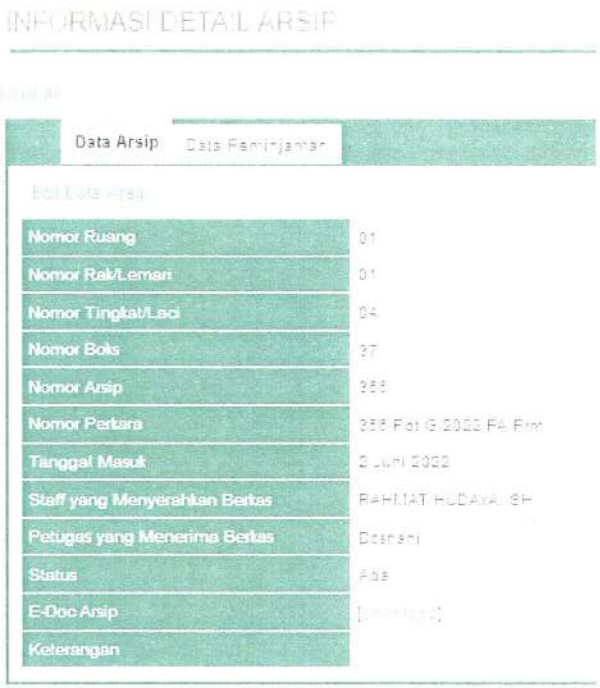 INFORMASI DETAIL ARSIP Data Arsip Nomor Ruang: 01 Nomor Rak/Lemari: 01 Nomor Tingkat/Laci: 04 Nomor Boks: 27 Nomor Arsip: 366 Nomor Perkara: 366/Pdt.G/2022/PA.Prm Tanggal Masuk: 3 Juni 2022 Staff yang Menyerahkan Berkas: RAHMAT HIDAYAT, SH Petugas yang Menerima Berkas: Darsani Status: Ada E-Doc Arsip: [illegible] Keterangan Isi berkas arsip perkara nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B LAMAN

	4. Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Prm putus tanggal 19 April 2022 dan telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 11 Mei 2022 dan diserahkan kepada Petugas Arsip tanggal 3 Juni 2022)	Sudah ditindaklanjuti dengan mengalih media dan mengupload arsip perkara nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Prm ke SIPP.	Arsip perkara nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP. INFORMASI DETAIL ARSIP Kembali Data Arsip Data Peminjaman Edit Data Arsip Nomor Ruang: 01 Nomor Rak/Lemari: 01 Nomor Tingkat/Laci: 04 Nomor Boks: 35 Nomor Arsip: 386 Nomor Perkara: 386 Pdt G 2022 PA Prm Tanggal Masuk: 3 Juni 2022 Staff yang Menyerahkan Berkas: RAHMAT HIDAYAT, SH Petugas yang Menerima Berkas: Dasriani Status: Ada E-Doc Arsip: [illegible] Keterangan:

			Isi berkas arsip perkara nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Prm yang telah dialih mediakan dan diupload ke SIPP.

3	E- Keuangan Perkara Saldo Uang ATK Saldo Keuangan ATK Perkara tidak balance dengan sisa perkara yaitu sampai tanggal 6 Juni 2022 sisa perkara 108, seharusnya saldo Rp5.400.000,00, dalam pemeriksaan saldo Rp12.155.000,00	Sudah ditindaklanjuti dengan membelanjakan uang ATK yang berlebih.	

4	Saldo HHK dan HHKL Setiap uang HHK dan HHKL telah disetorkan ke Kas Negara. Kemudian masih ada penambahan pajar biaya perkara setelah perkara putus (perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm. dan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm.)	Sudah disosialisasikan kepada Majelis Hakim, Panitera, dan Kasir untuk setiap perkara yang kurang panjarnya untuk ditambahkan terlebih dahulu sebelum perkara putus.	

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

No.	Hasil Temuan	Tindak Lanjut	Bukti
1	Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut, ditemukan: 1. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, sementara yang ditunjuk oleh Panitera adalah Jurusita. dan ada perintah ..... bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti ....,,, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang; 2.Ada Pergantian Majelis (PMH baru) Namun dasar pergantiannya adalah tanggal saat dikeluarkannnya PMH baru tersebut, seharusnya tanggal PMH Awal.	Sudah ditindaklanjuti dengan mengubah PHS dengan mengganti pada kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti menjadi Jurusita dan sudah melakukan perubahan pada tanggalnya yang semula tanggal saat dikeluarkan PMH baru tersebut menjadi tanggal PMH awal.	Bukti pergantian kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti menjadi Jurusita 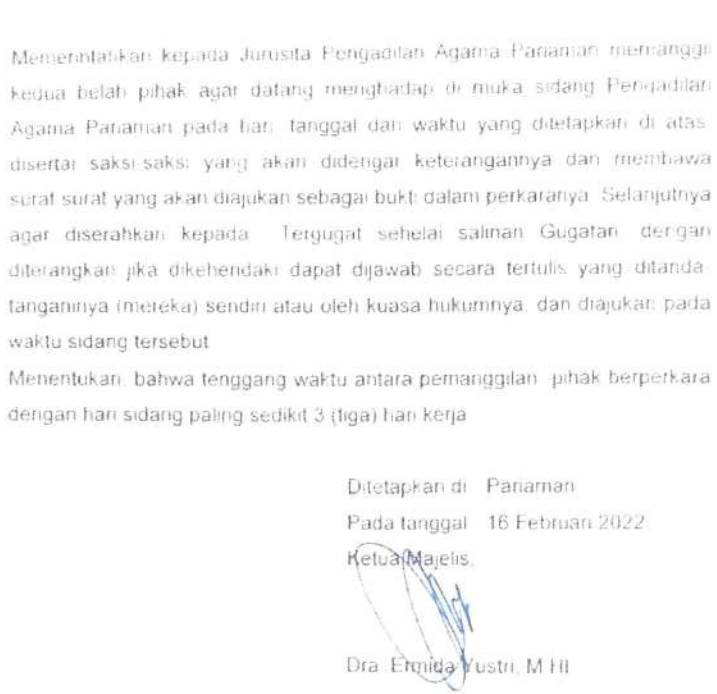 Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pariaman memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pariaman pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda tangannya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja Ditetapkan di Pariaman Pada tanggal 16 Februari 2022 Ketua Majelis, Dra. Ermida Yustri, M.Hi

Bukti perubahan tanggal PMH.

PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm

Ketua Pengadilan Agama Pariaman telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm. Tanggal 16 Februari 2022

Menimbang, bahwa oleh karena hakim anggota an. Wisri, S.Ag yang telah ditetapkan tersebut sakit maka perlu ditetapkan majelis hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

MENETAPKAN

1. Dra. Ermida Yustri, M.HI	Sebagai Hakim Ketua.
2. Milda Sukmawati, S.H.I	Sebagai Hakim Anggota
3. Osvia Zurina, S.H.I	Sebagai Hakim Anggota.

Ditetapkan kembali di Pariaman
Pada tanggal 23 Februari 2022
Ketua,

Yang Ariani, S. Ag., MH

2	Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm.. Dalam berkas tersebut, ditemukan: Pada BAS Pertama tertulis Susunan Persidangan 1. 2... dan 3... bila dicocokkan dengan PMH tidak sama Majelis Hakimnya dan kalaupun ada pergantian Majelis Hakim, seharusnya ada PMH baru. tetapi dilihat pada BAS dan Putusan yang menandatanganinya adalah Majelis Hakim sesuai dengan PMH Awal.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan susunan majelis pada BAS perkara nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm	BERITA ACARA SIDANG Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm Sidang Pertama Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Utama, Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu 02 Februari 2022 dalam perkara cerai gugat antara: **Yesni Anita Binti Jala**, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Durian Sauleh Korong Sungai Sirah Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yasrianto, SHI** Advokat yang berkantor di Jalan Kresnami Pasar Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022, email: yasriantokeren@gmail.com sebagai **Penggugat;** Melawan **Muslir bin M. Nur,** NIK 1377020701650004 tempat dan tanggal lahir Ampalu, 07 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;** Susunan majelis yang bersidang adalah sebagai berikut: 1. Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis 2. Milda Sukmawati, S.HI sebagai Hakim Anggota.

3	Perkara Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan: 1. Perkara tersebut adalah perkara E Court. salah satu konsiderannya dalam PMH tertulis ... Susunan Majelis Hakim Tahun 2021, sementara SK Susunan Majelis Hakim Tahun 2022 sudah terbit, seharusnya SK Susunan Majelis Hakim Tahun 2022. 2. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, senyatanya adalah Juru Sita Pengganti, Sepert halnya dalam Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera. dan ada perintah ..... bahwa kepada Para pihak untuk membawa bukti-bukti ....,,, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang tersebut. Dalam hal ini, andaikan Tergugat hadir dengan menyerahkan	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada PHS perkara nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm.	**SURAT PENUNJUKAN** **Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm** Panitera Pengadilan Agama Pariaman telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm Tanggal 03 Februari 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim. Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang ~~Jurusita~~/Jurusita Pengganti ; Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. MENUNJUK Saudara Arif Rahman sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas : Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis. Pariaman, 03 Februari 2022 Panitera, Riswan, SH

	jawaban, begitupula kalau Penggugat hadir dengan dengan mengajukan bukti-buktinya, bagaimana dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu supaya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu; 3. Akta Cerai terbit tanggal 25 Maret 2022, sementara perkara tersebut BHT nya tanggal 8 Maret 2022. Tabayyun ke PA. Padang.		PENETAPAN Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm Ketua Majelis Pengadilan Agama Pariaman membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm Tanggal 03 Februari 2022 dan Gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm Tanggal 03 Februari 2022 dalam perkara antara Intan Permata Sari Binti Syamsul, tempat dan tanggal lahir Medan Baik, 16 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Korong Kampuang Tangah, Padang Bintungan, Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat sebagai Penggugat lawan Afrit Zaidi Bin Ismael, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 April 1988, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Lambung Bukit, Kel. Lambung Bukik, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai Tergugat Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang. Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait MENETAPKAN Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 09.00 WIB. Memerintahkan kepada ~~Jurusita~~/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dsc. Pariaman memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka

4	Perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm. . Dalam berkas tersebut ditemukan : 1. Pada BAS Pertama ada pernyataan tentang Penjelasan Mediasi dan Penunjukan Mediator. Dalam hal tersebut ada zig zag, namun tidak ada paraf. Seharusnya ada paraf 2. Dalam putusan ada amar tentang hak asuh anak dan nafkah anak, namun tidak ada bukti tentang Akta Kelahiran.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan berupa pemberian paraf dan sc setelah zig zag pada BAS Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm	Kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik; Selanjutnya Ketua Majelis membenkan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman; Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman dan Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Dra. Ermida Yustri M.H.I sebagai mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:

5	Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan : 1. Status Penggugat adalah PNS, namun dalam berkas yang diminutasi tidak dimasukkan Surat Izin dari atasan., 2. Dalam BAS tidak ada tertuang tentang adanya Surat Izin atasan tersebut dan dalam Putusan tidak dipertimbangkan. Dan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut ditemukan Surat Izin dari atasan, namun tidak dituangkan dalam BAS dan tidak juga dipertimbangkan dalam Putusan.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan memasukan surat izin atasan kedalam BAS dan memasukan surat izin tersebut kedalam berkas.	Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil; Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Pemohon dengan surat dari Rumah Sakit Paru Nomor 445.01.46/RSP/TU-Kepeg/II/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum; Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan bahwa para hadirin ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Nomor 356/21/IX/1996 Tanggal 04 September 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

RUMAH SAKIT PARU

Jln. Dr. M. Ismail No. 120 [illegible]

[illegible]

[illegible] Maret [illegible]

[illegible]

445 [illegible] (RSP-[illegible]/[illegible])

Lampiran: Berkas

Permohonan Izin [illegible]

Menindak lanjuti surat dari [illegible] atas nama:

1. Nama	[illegible]
2. NIP	[illegible]
3. Pangkat/Gol.	[illegible]
4. Alamat	[illegible]

Setelah [illegible] tidak kekurangan [illegible]

Demikian [illegible] sebagaimana [illegible]

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

TAHUN 2022

D. Administrasi Umum			
No.	**Hasil Temuan**	**Tindak Lanjut**	**Bukti**
1	Aplikasi E-Bima tahun 2021 belum diisi lengkap dan tahun 2022 belum diisi	Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi data-data yang belum lengkap	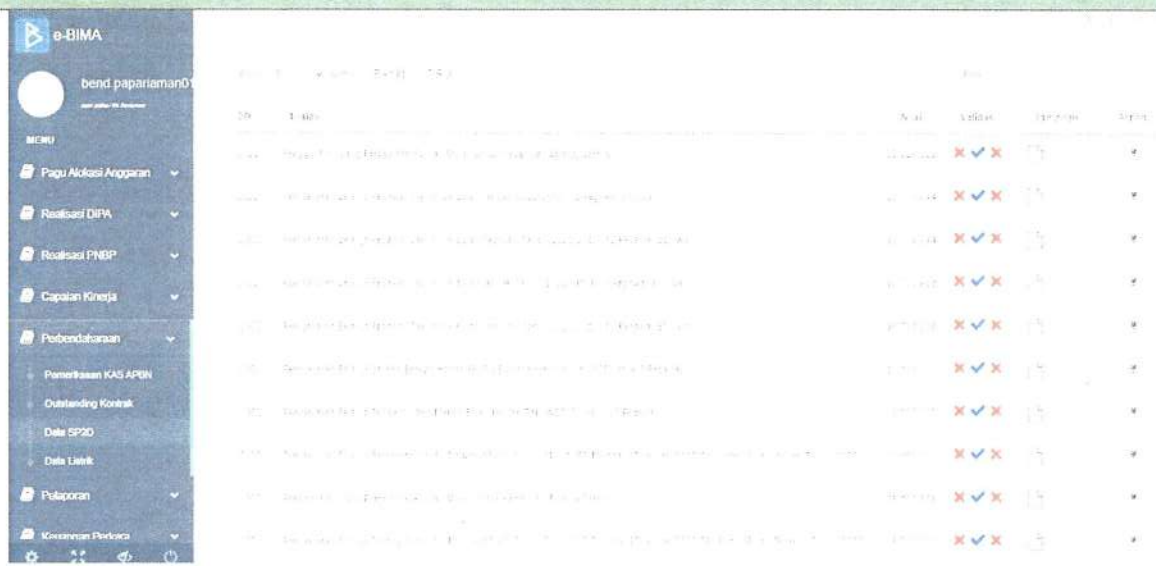

2	Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan beserta data dukung yang belum terjilid rapi	Sudah ditindaklanjuti dengan menjilid Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan	

3	1. Dokumen pertanggung jawaban belum disusun rapi (dapat dilihata dikriteria)	Telah disusun berdasarkan kriteria :GUPSP2D-SPM-SPP-DRPP-SPBy-Kuitansi-Nota-SSPajak	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN DAFTAR SP2D SATKER [illegible] [illegible] [illegible]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

PENERIMAAN | JUMLAH UANG
Jumlah Penerimaan

POTONGAN | JUMLAH UANG
Jumlah Potongan

TOTAL PEMBAYARAN

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

PENERIMAAN | JUMLAH UANG
Jumlah Penerimaan

POTONGAN | JUMLAH UANG
Jumlah Potongan

TOTAL PEMBAYARAN

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : [illegible]

[illegible]

DIA PENGELUARAN

No.	Kode Rekening	Nama Rekening/Keterangan	[illegible]	[illegible]	Jumlah Uang
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

SURAT PERINTAH BAYAR

6 lt	ok Total Toko	90 000	540 000
1 pc	Saringan oli		50 000
1 pc	Busi PBK		100 000
1 pc	Saringan udara		180 000
1 bk	Air Aki besar		15 000
1 pc	Saringan minyak		150 000
	Biaya jasa		307 500

1 240 500

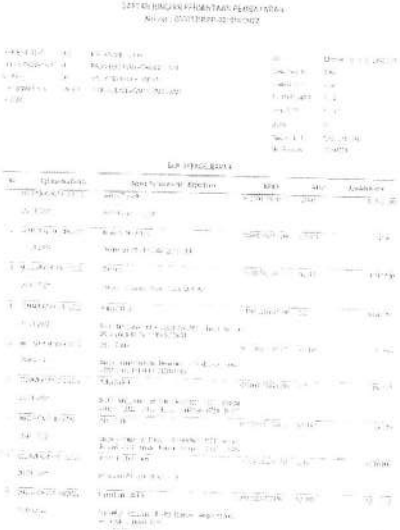

PENGADILAN AGAMA PARAMAN

SURAT PERINTAH BAYAR

6	Ob total Jeno	98.000	588.000
1	Sewaktu ob		50.000
1	Rem kak		100.000
1	Sewaktu udara		180.000
1	Air aqua besar		15.000
1	Sewaktu minggu		150.000
	Jumlah		387.000

	2. Kuitansi pemeliharaan kendaraan dinas pada bulan Mei 2022 belum ditandatangani oleh Penanggungjawab kendaraan	Telah ditandatangani oleh penanggung jawab kendaraan dinas sesuai dengan pejabat yang telah di-SK kan	

Tahun Anggaran 2022
Nomor Bukti 00168/KW/401918/2022
Akun 1068-EBA-523121
Kepada PT Pertamina
Satker 401918 - PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
Jumlah Uang Rp. 1.650.000,00
Terbilang Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier
Untuk Pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 BA 13 W berupa BBM bulan Mei 2022

KAB. PADANG PARIAMAN, 31 Mei 2022
PENERIMA UANG
Sekretaris

Hendri, SES, Hi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ZULHAMDI, S.AG, S.H
NIP 197809032009041001

Lunas dibayar, 31 Mei 2022
Bendahara Pengeluaran

ATIKA ZAFIKRI, S.KOM
NIP 198809182011012015

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima sebenarnya dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

ARIF RAHMAN
NIP 198011[illegible]121001

	3. Spd halaman 2 pada belum ditanda tangani PPK	Spd lembar ke-2 telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen	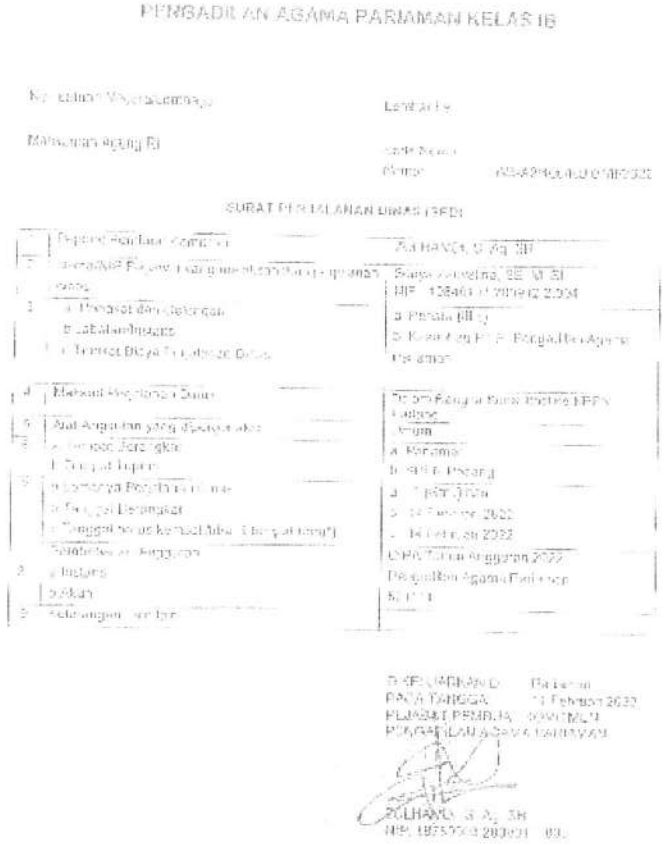 PENGADILAN AGAMA PARAMAN KELAS IB SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) PARAMAN, 21 Februari 2022 PENGADILAN AGAMA PARAMAN KELAS IB PADA TANGGAL 21 Februari 2022 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SULHAWI, S.Ag., SH NIP. 197510112003121 003

Pada Tanggal 14 Februari 2022

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pejabat Pengawas Kecamatan

Pejabat Pembina Kepegawaian

	4. Pada lembar kuitansi belum ditanda tangani pejabat penerima hasil	Kuitansi pembelian dan pemeliharaan telah ditandatangani pejabat penerima hasil	

Tahun Anggaran 2022
Nomor Bukti 00168/KW/401918/2022
Akun 1566 EBA-523121
Kepada PT Pertamina
Satker 401918 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
Jumlah Uang Rp 1.650.000,00
Terbilang Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier
Untuk Pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 BA 13 W berupa BBM bulan Mei 2022

KAB. PADANG PARIAMAN, 31 Mei 2022
PENERIMA UANG
Sekretaris

Herman, S.H.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ZULHAMDI, S.AG., S.H.
NIP 197409032009041001

Lunas dibayar, 31 Mei 2022
Bendahara Pengeluaran

ATIKA ZAFIKRI, S.KOM
NIP 198809182011012015

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/selesaikan sepenuhnya pada tgl.
Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Pejabat yang bertanggungjawab
Penerima Barang

ARIF RAHMAN
NIP 198811132012121001

	5. Pada kuitansi daya dan jasa belum dibubuhkan tanda tangan bendahara, ppk dan penerima hasil	Kuitansi daya dan jasa telah disahkan oleh bendahara, pejabat pembuat komitmen dan penanggungjawab penerima barang/hasil	Tahun Anggaran : 2022 Nomor Bukti : 00067/KW/401916/2022 Akun : 1066-EBA-522111 Kepada : PT.PLN Persero Satker : 401916 - PENGADILAN AGAMA PARIAMAN **Kuitansi/ Bukti Pembayaran** Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jumlah Uang : Rp 4.770.510,00 Terbilang : Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah Kuitansi Supplier : Untuk Pembayaran : langganan listrik bulan Februari 2022 untuk ID Pel 131040080654 KAB. PADANG PARIAMAN, 17 Maret 2022 PENERIMA UANG ATIKA Z a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ZULHAMDI,S.AG.,S.H NIP 197809032009041003 Lunas dibayar, 17 Maret 2022 Bendahara Pengeluaran ATIKA ZAFIKRI,S.KOM NIP 198809182011012015 Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan Pejabat yang bertanggung jawab Penerima Barang Pejabat yang bertanggungjawab Penerima Barang ADE RAHMAN NIP 198611122012121001

Tahun Anggaran	2022
Nomor Bukti	09158/KW/401916/2022
Akun	1066-EBA-523121
Kepada	Wahyu Iswandi qq Sahabat Teknik AC
Satker	401916 - PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah terima Dari	Pejabat Pembuat Komitmen
	Satker PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
Jumlah uang	Rp. 1.312.500,00
Terbilang	Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Untuk Pembayaran	pemeliharaan AC sebanyak 13 (tiga belas) unit

KAB. PADANG PARIAMAN, 24 Mei 2022
PENERIMA UANG

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ZULHAMDI, S.AG., S.H.
NIP 197809032009041003

Lunas dibayar, 24 Mei 2022
Bendahara Pengeluaran

ATIKA ZAFIKRI, S.KOM
NIP 198809182011012015

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

ABUR RAHMAN
NIP 196511222012121001

	6. Pada kuitansi bantuan sewa rumah dinas , dengan nilai diatas Rp.2.000.000, - (Dua Juta rupiah) belum ditemukan pembayaran PPN	Untuk pembayaran sewa rumah dinas hakim periode berikut nya akan dibayarkan per-bulan dan dipungut PPh 4 ayat 2	-
	7. Pada kuitansi rumah dinas yang di data NPWP ditulis NPWP hakim seharusnya NPWP pemilik rumah jika tidak ada NPWP satuan kerja	Untuk pembayaran sewa rumah dinas hakim periode berikut nya akan digunakan NPWP pemilik rumah untuk pembayaran PPh 4 ayat 2	-

	8. Kuitansi pengadaan atk dan pemeliharaan peralatan mesin yang dicetak oleh sakti tertera nama pegawai, seharusnya nama pemilik toko atau bengkel yang bersangkutan	Kuitansi pengadaan atk dan pemeliharaan peralatan mesin sudah diperbaharui dengan mencantumkan nama pemilik toko atau bengkel yang bersangkutan	Tahun Anggaran : 2022 Nomor Bukti : 00158/KW/401916/2022 Akun : 1066-EBA-523121 Kepada : Wahyu Iswandi qq Sahabat Teknik AC Satker : 401916 - PENGADILAN AGAMA PARIAMAN **Kuitansi/ Bukti Pembayaran** Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jumlah uang : Rp 1.332.500,00 Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah Untuk Pembayaran : pemeliharaan AC sebanyak 13 (tiga belas) unit KAB. PADANG PARIAMAN, 24 Mei 2022 PENERIMA UANG a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ZULHAMDI, S.AG.,S.H NIP 197809032009041003 Lunas dibayar, 24 Mei 2022 Bendahara Pengeluaran ATIKA ZAFIKRI, S.KOM NIP 198609182011012015 Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan Pejabat yang bertanggung jawab Penerima Barang Pejabat yang bertanggungjawab Penerima Barang ARIF RAHMAN NIP 198811222012121001

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari: Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Jumlah Uang: Rp 1.665.000,-

Terbilang: satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah

Kuitansi Supplier

Untuk Pembayaran: pembelian atk

KAB. PADANG PARIAMAN, 9 - 6 - 2022
PENERIMA UANG

DIAN OFFSET

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ZULHAMDI S.AG.,S.H
NIP 197809032009041003

Lunas dibayar, 9 - 6 - 2022
Bendahara Pengeluaran

ATIKA ZAFIKRI,S.KOM
NIP 198609182011012015

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

ARIF RAHMAN
NIP. 198611122012121001

4	1. Masih ada pejabat/pegawai yang presensi online di luar kantor	Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan himbauan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk dapat melakukan presensi online didalam kantor dan telah dilaksanakan. Serta pembuatan berita acara jika terdapat eror dalam absensi online.	Bukti himbauan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk dapat melakukan presensi online didalam kantor. 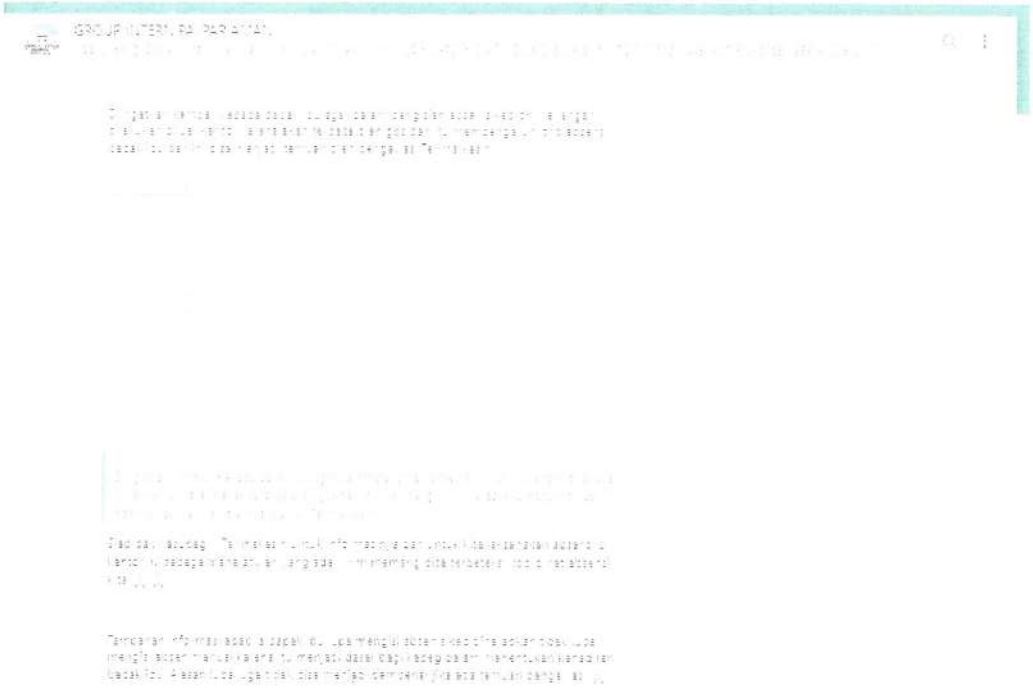 'Bukti pelaksanaan presensi online. 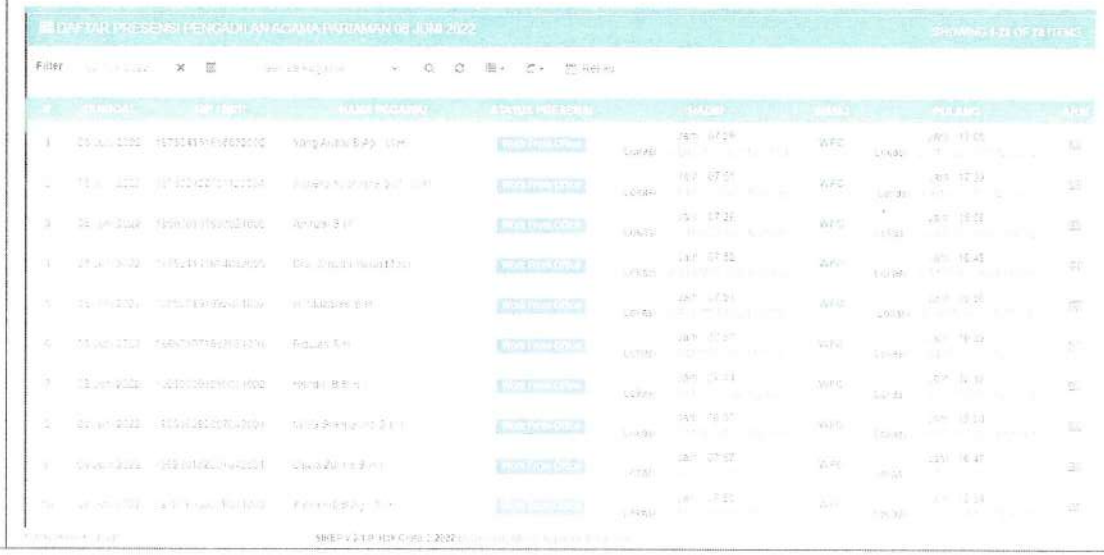

			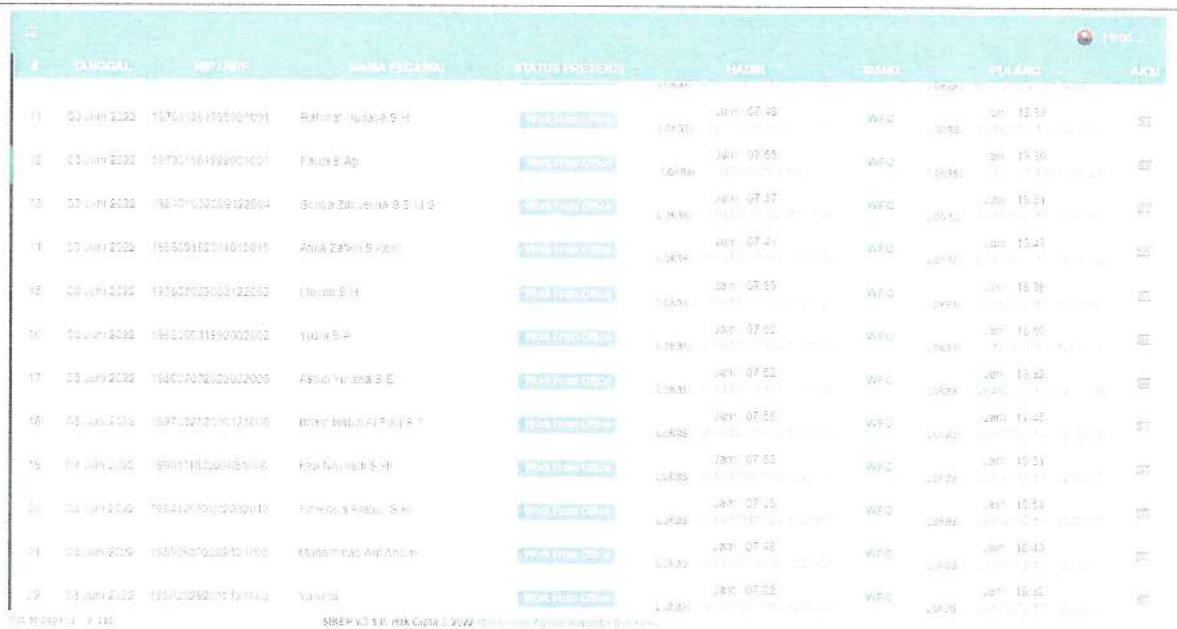
	2. Penginputan ketidakhadiran pegawai pada profil pegawai baru dimulai pada bulan mei 2022	Penginputan ketidakhadiran pegawai pada profil pegawai telah dilaksanakan.	

	3. Mesin presensi elektronik rusak pada bagian nama pegawai	Mesin presensi elektronik telah diperbaiki dan datanya ditarik setiap hari.	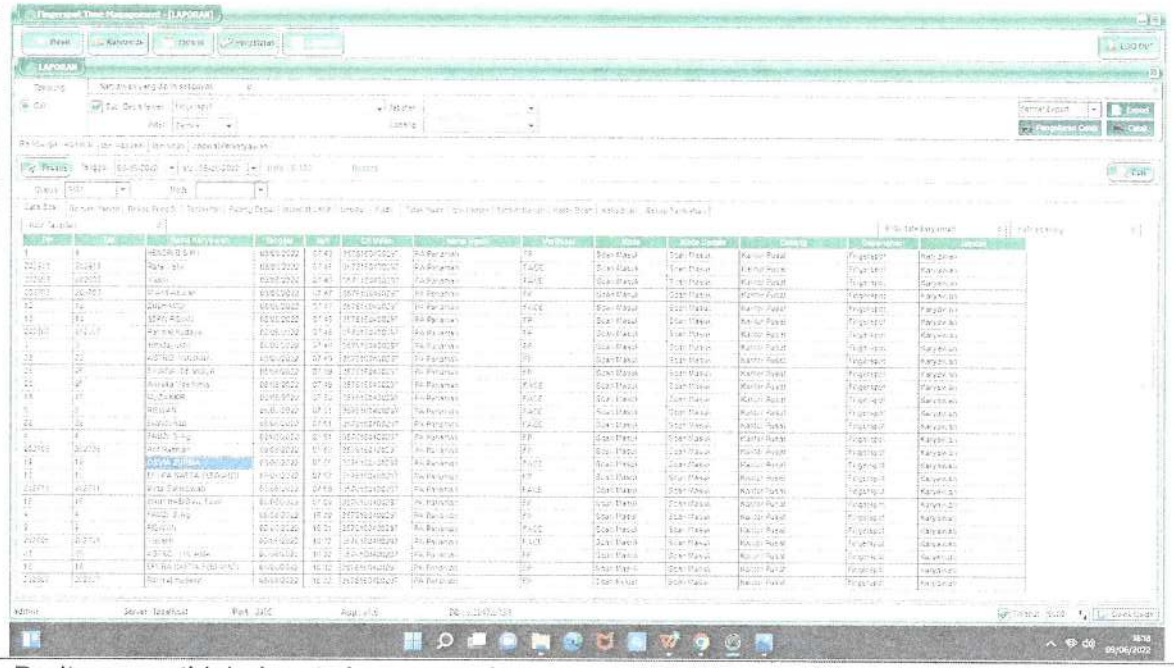
	4. Masih ada pegawai yang tidak mengisi presensi online ataupun manual	Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara tidak dapat absen masuk dan pulang.	Berita acara tidak dapat absen masuk

			Berita acara tidak dapat absen pulang

5	Masih ada PKP mulai bulan Pebruari 2022 sampai bulan mei 2022 belum ditanda tangani atasan langsung	Sudah ditindaklanjuti penanda tanganan PKP bulan Februari – Mei 2022 oleh atasan langsung.	PKP Bulan Februari 2022 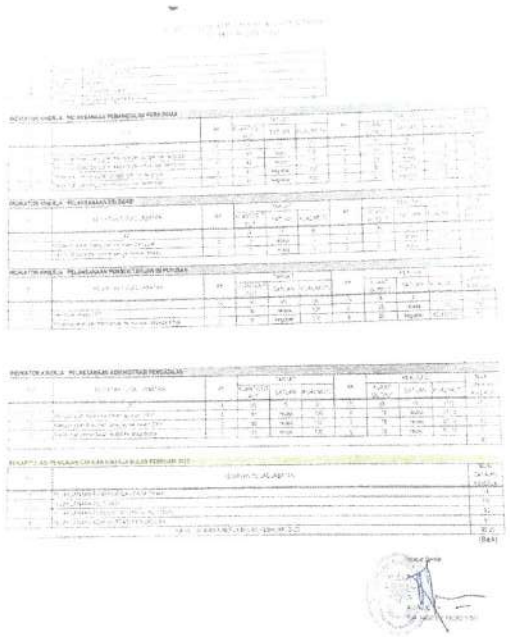 PKP Bulan Maret 2022

PKP Bulan April 2022

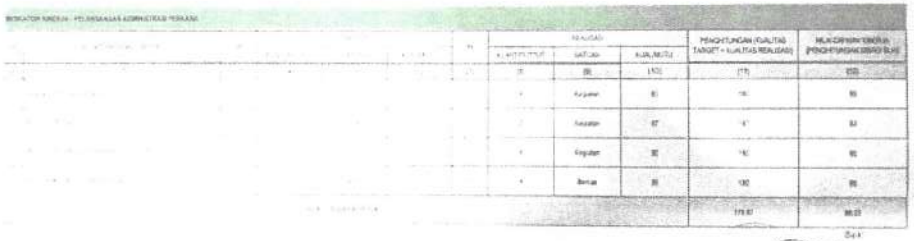

PKP Bulan mei 2022

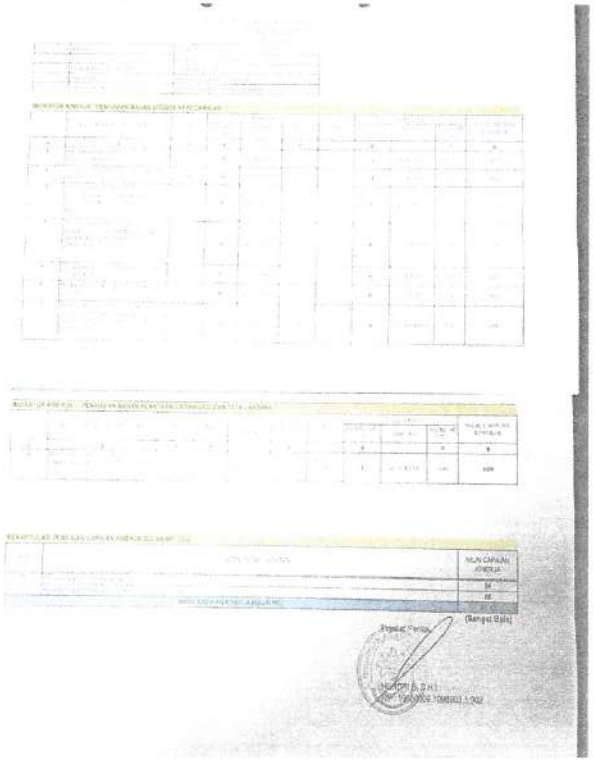

6	Belum menetapkan hps pada pengadaan genset	Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan hps pada pengadaan genset.	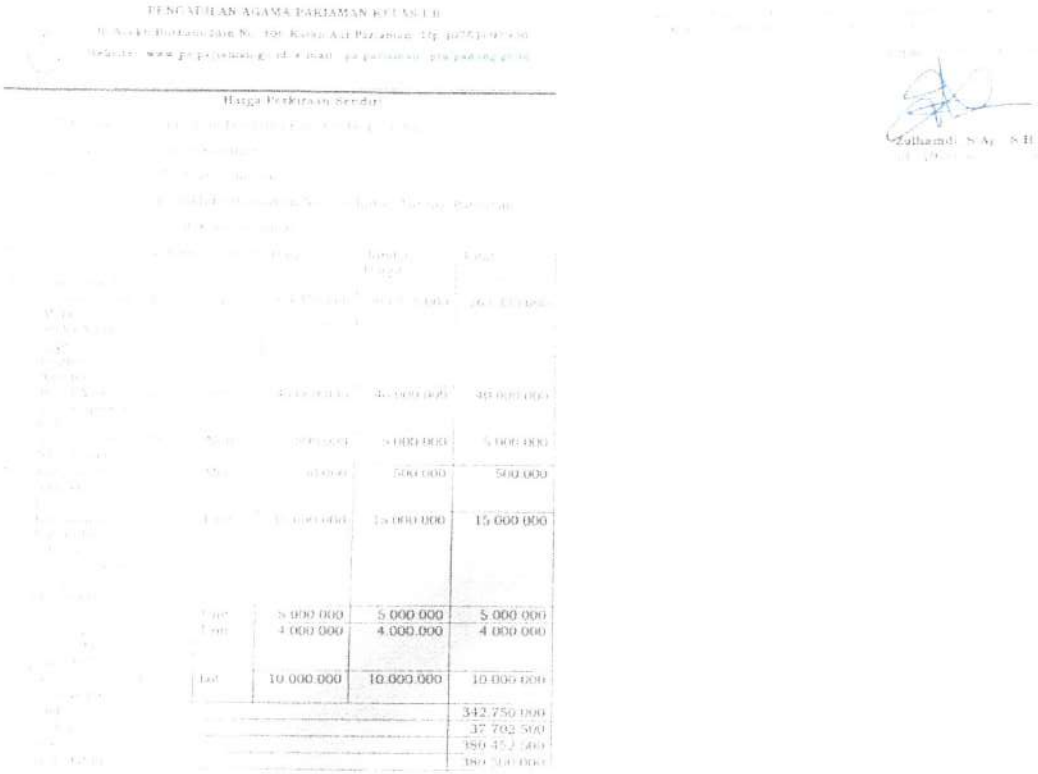

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B

Harga Perkiraan Sendiri

			30 000 000
		5 000 000	5 000 000
		500 000	500 000
		15 000 000	15 000 000
Unit	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Unit	4 000 000	4.000.000	4 000 000
Lot	10 000 000	10.000.000	10 000 000
			342 750 000
			37 702 500
			380 452 500
			380 500 000

Zulhamdi S.Ag., S.H.

7	Pada tanggal 06-06-2022, Lembar Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) belum ditanda tangani oleh Atasan Langsung mulai bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2022	Sudah ditindaklanjuti penanda tanganan PKP bulan Februari – Mei 2022 oleh atasan langsung.	PKP Bulan Februari 2022 PKP Bulan Maret 2022

PKP Bulan April 2022

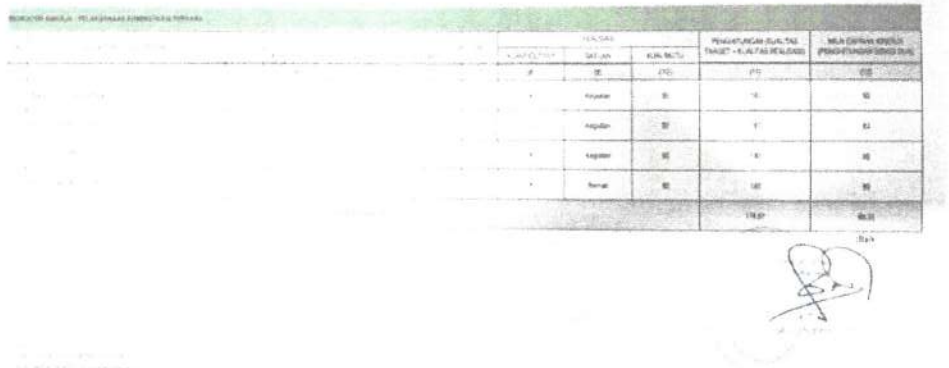

PKP Bulan mei 2022

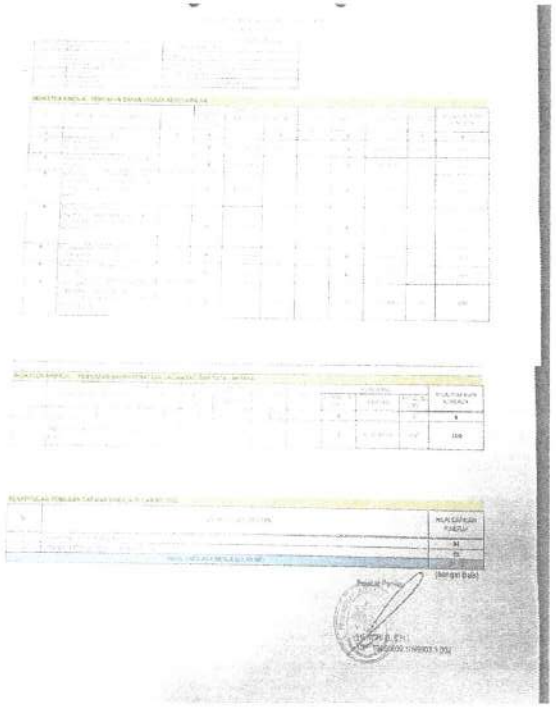

8	Masih ada Tender /pengadaan belum dilaksanakan	Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan tender yang belum dilaksanakan.	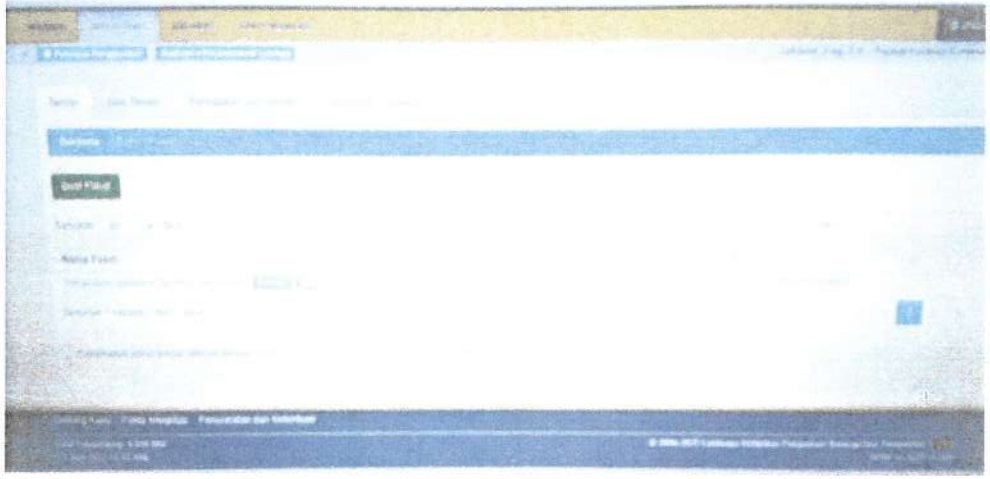

9	1. Laporan Keuangan, Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa. belum update (posisi tanggal 6-6-2022)	Sudah di perbaiki dengan mengupdate laporan keuangan, daftar asset dan inventaris serta informasi pengadaan barang dan jasa pada website Pengadilan Agama Pariaman.	Screenshoot laporan keuangan yang telah di perbaharui pada website PA Pariaman Screenshoot daftar asset dan inventaris yang telah di perbaharui pada website PA Pariaman

	2. Renstra pada Bab IV belum diupload.	Sudah diperbaiki dengan mengupload renstra pada bab IV.	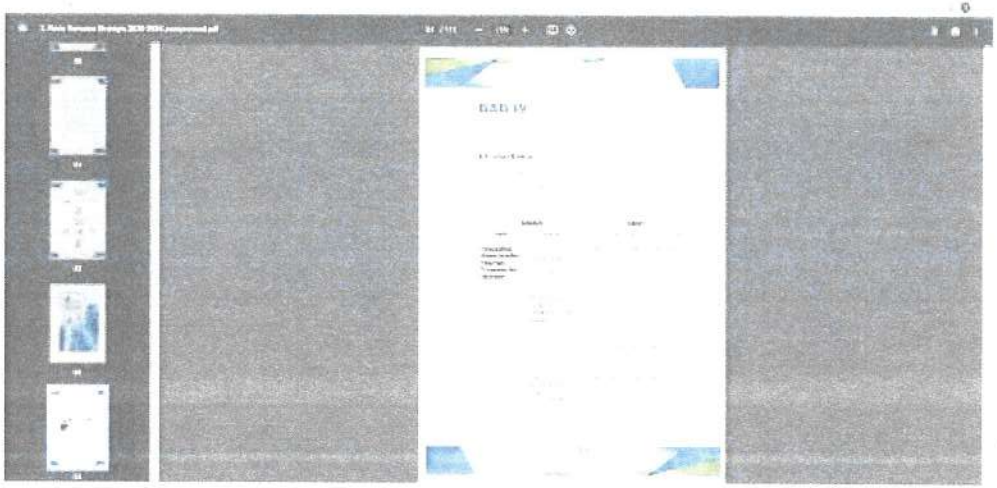

10	Evaluasi PPNPN triwulan I belum dilaksanakan.	Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan evaluasi PPNPN.	Undangan pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi PPNPN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B Daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi PPNPN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Notulen rapat monitoring dan evaluasi PPNPN

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman,Tlp. 0751-91900,
Website : pa-pariaman.go.id, e-mail :pa.pariaman@pta-padang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam	Jumat, 1 April 2022
Tempat	Ruang Media Center
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Agama Pariaman
Peserta Rapat	Seluruh Pimpinan dan PPNPN Pengadilan Agama Pariaman

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PPNPN

1. Petugas keamanan yang piket diarea parkir agar membantu dan mengatur parkir kendaraan pengunjung PA Pariaman
2. Petugas keamanan mengatur jadwal piket jaga pada jam istirahat untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetap kondusif selama jam istirahat.
3. Petugas keamanan melayani pengunjung yang datang dengan menanyakan keperluannya untuk kemudian diarahkan kepada petugas kemudian ke meja pelayanan sesuai kebutuhannya.
4. Untuk menjaga ketertiban dan menghindari kesalahan informasi kepada pengunjung petugas keamanan tidak boleh memberikan informasi diluar kapasitasnya, segera arahkan ke petugas pelayanan
5. Petugas keamanan menanyakan seperlian pengunjung, kemudian mengarahkannya, untuk yang berperkara ke PTSP sedangkan tamu ke Resepsionis
6. Petugas PTSP harus selalu *stand by* dan harus melayani pelanggan tanpa membeda bedakan jenis pelayanannya, agar tidak ada pengunjung yang terabaikan
7. Petugas PTSP selalu menerapkan 3S dan service excellent agar tercapainya pelayanan prima.
8. Resepsionis lebih cepat tanggap dan cekatan dalam melayani tamu yang berkunjung dengan menanyakan keperluannya untuk kemudian diarahkan kepada pegawai yang mempunyai kewenangan

			PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Jl. Syekh Burhanuddin No. 105 Karan Aur Kota Pariaman,Tlp. 0751 91990 Website : pa-pariaman.go.id, e-mail : pa-pariaman@pta-padang.go.id NOTULEN RAPAT 9. Ahmad Sudi dan [illegible] Lubuk Indaco Kecil dan [illegible] yang Layak dan [illegible] sehingga [illegible] yang [illegible] 10. Sebelum [illegible] dan Lingkungan PA Pariaman Mengetahui/Menyetujui Rapat Ketua Yang Arsanti, S.Ag.,M.H NIP. 197304131998032002 Penanggung Jawab Notulen CPNS Astrid Yuliana, S.E

11	Masih ada Daftar Inventaris Barang yang belum diupdate sesuai dengan kondisi barang dalam ruangan.	DBR sudah diupdate sesuai dengan kondisi barang dalam ruangan.	 DAFTAR BARANG RUANGAN

12	1. Aset pada DBR pustaka tidak sesuai dengan kondisi di ruang pustaka, ada beberapa aset yang sudah dipindahkan seperti meja dan kursi	Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaharui DBR yang sesuai dengan kondisi di ruang pustaka.	

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
KODE UPB : 005.01.08.401916.000.KD

NAMA RUANGAN : PERPUSTAKAAN
KODE RUANGAN : 10

No.	No. Urut Pendaft.	Nama Barang	Merk/Type	Identitas Barang: Kd Barang	Identitas Barang: Th Pdh	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	10	Rak Buku		3.05.01.04.003	2015	1	Buah	Mik Sendiri	
2	11	Rak Buku		3.05.01.04.003	2015	1	Buah	Mik Sendiri	
3	12	Rak Buku		3.05.01.04.003	2015	1	Buah	Mik Sendiri	
4	30	Meja Kerja Kayu	[illegible]	3.05.01.01.001	2015	1	Buah	Mik Sendiri	
5	177	Kursi Rotan/Wicker	[illegible]	3.05.02.01.002	2015	1	Buah	Mik Sendiri	
6	313	Kursi Besi/Metal	MORANDI [illegible]	3.05.02.01.001	2017	1	Buah	Mik Sendiri	[illegible]
7	1	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
8	2	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
9	3	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
10	4	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
11	5	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
12	6	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
13	7	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
14	8	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
15	9	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
16	10	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
17	11	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
18	12	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
19	13	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
20	14	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
21	15	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
22	16	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
23	17	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
24	18	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
25	19	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
26	20	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
27	21	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
28	22	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
29	23	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
30	24	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
31	25	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
32	26	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	
33	27	Monograf		6.01.01.01.001	2002	1	Buah	Mik Sendiri	

Dan seterusnya dimindahkan Barang-barang yang ada pada daftar ini tanda tanggungjawab penyimpanan pada Unit Kerja/Unit Pengguna Barang (DAKNI) dan penanggung jawab ruangan ini

Pariaman, [illegible] 2022
Penanggung Jawab Ruangan

[illegible]
NIP [illegible]

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
KODE UPB : 005.01.08.401916.000.KD

NAMA RUANGAN : PERPUSTAKAAN
KODE RUANGAN : 19

No.	No Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang		Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th Pdh				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
511	505	Monografi	OBLIGASISYARIAH KONSEP DASAR OBLIGASISYARIAH	6.01.01.01.001	2015	1	Buah	Milik Sendiri	Konsep Dasar
512	506	Monografi	SISTEM DAN MEKANISME PENGAWASAN SYARIAH	6.01.01.01.001	2015	1	Buah	Milik Sendiri	Pengawasan Syariah
513	507	Monografi	SISTEM DAN MEKANISME PENGAWASAN SYARIAH	6.01.01.01.001	2015	1	Buah	Milik Sendiri	Pengawasan Syariah
514	508	Monografi	PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA PROF RIFYAL K.	6.01.01.01.001	2016	1	Buah	Milik Sendiri	Penegakan Syariat
515	509	Monografi	PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA PROF RIFYAL K.	6.01.01.01.001	2016	1	Buah	Milik Sendiri	Penegakan Syariat
516	510	Monografi	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Y	6.01.01.01.001	2021	1	Buah	Milik Sendiri	Pengadilan Agama
517	511	Monografi	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas	6.01.01.01.001	2021	1	Buah	Milik Sendiri	Pengadilan Agama

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang atau atasan penanggung jawab ruangan ini

Pariaman 17-05-2022

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

HENDRA, SH.I
198606[illegible]031002

Penanggung Jawab Ruangan

ATIKA ZAFIKRI S.Kom
198609182011012015

	2. Aplikasi SLIM baru mulai dikerjakan.	Sudah dilakukannya update pada aplikasi SLIM dan akan di monitoring secara berkala.	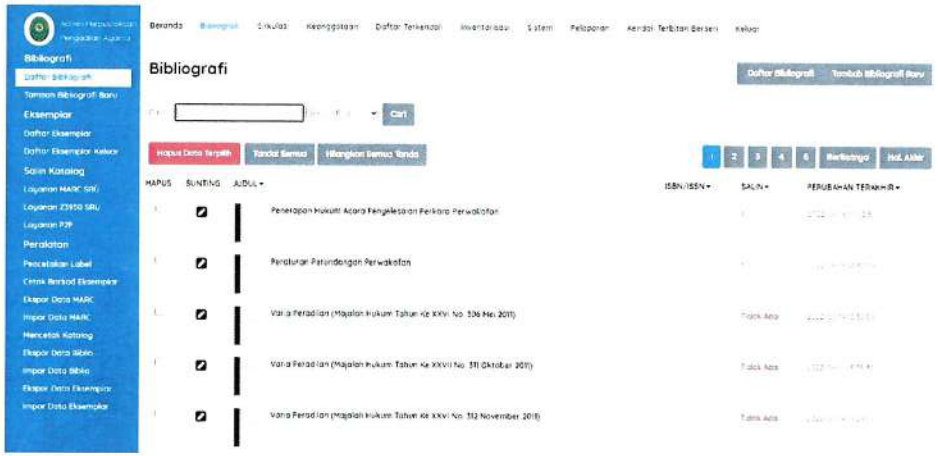 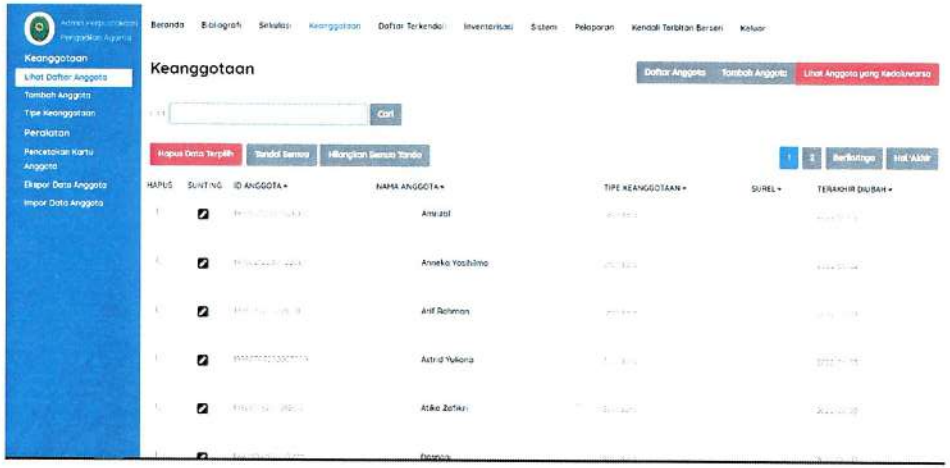

13	SOP Pengelolaan Biaya Proses/ATK Perkara Pembebasan Perkara belum dibuat.	Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP Pengelolaan Biaya ATK Perkara Pembebasan biaya.	

	MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Pariaman Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur - Pariaman Telp 0751-91900 Email : pa.pariaman@pta-padang.go.id Website : www.pa.pariaman.go.id	Nomor SOP	SOP/AP/64
		Tanggal Pembuatan	10 Juni 2022
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	10 Juni 2022
		Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Yang Arjani, S.Ag., M.H. NIP. 19730413.199803.2.002

SOP PELAYANAN PENGELOLAAN ATK PERKARA PEMBEBASAN BIAYA

Dasar Hukum :
1. HIR/Rbg
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
4. PERMA No. 2 Tahun 2009

Keterkaitan :
1. SOP Penyelesaian Perkara
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar
3. SOP Pendaftaran Upaya Hukum

Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU
2. D 3 Administrasi
3. S 1 Syari'ah
4. S 1 Hukum

Peralatan Perlengkapan:
Computer, Berkas Perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku-Buku Referensi

Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada siadpa

No	Aktivitas	Pelaksanaan							Mutu Buku		
		Ketua	Panitera	Pembuat Komit Men	Kasir	Bendahara	Pejbt Pengadaan	Pemegang ATK	Pensyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerbitkan SK Tentang Penggunaan ATK Perkara Pembebasan Perkara								RKT, Perma	5 menit	SK
2	-Berdasarkan SK tersebut, panitera (selaku penanggung jawab pengelola ATK Perkara) menyusun prediksi penerimaan dan kebutuhan ATK perkara prodeo untuk 1 (satu) tahun -Rencana kebutuhan ATK dan Rencana anggaran Biaya ATK perkara adalah								SK, Perencanaan	30 menit	RAB

	pedoman bagi PPK dalam pengelolaan/pengadaan ATK perkara										
3	-Membuat perencanaan belanja secara berkala dengan berpedoman pada prediksi penerimaan dan kebutuhan ATK perkara prodeo untuk 1 tahun yang disusun oleh penanggung jawab pengelola ATK; -Membuat perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil stok opname pemegang ATK; -Menyerahkan hasil perencanaan pada pejaabat pengadaan.								SK, RAB	30 menit	Perencanaan Belanja Kebutuhan
4	-Mengeluarkan biaya ATK perkara dari DIPA 04.									5 menit	
5	-Melaksanakan pengadaan belanja ATK sesuai perencanaan Panitera									30 menit	
6	-Bendahara Pengeluaran Rutin melakukan pembayaran yang di ajukan oleh pembuat komitmen biaya ATK perkara yang telah disahkan oleh pengelola biaya ATK perkara -Bendahara Pengeluaran Rutin melaksanakan tugas perbendaharaan yang berumber dari anggaran biaya DIPA 04, untuk itu bendahara ATK perkara harus membukukan pajak yang dipunguut dalam buku bantu pajak									15 menit	

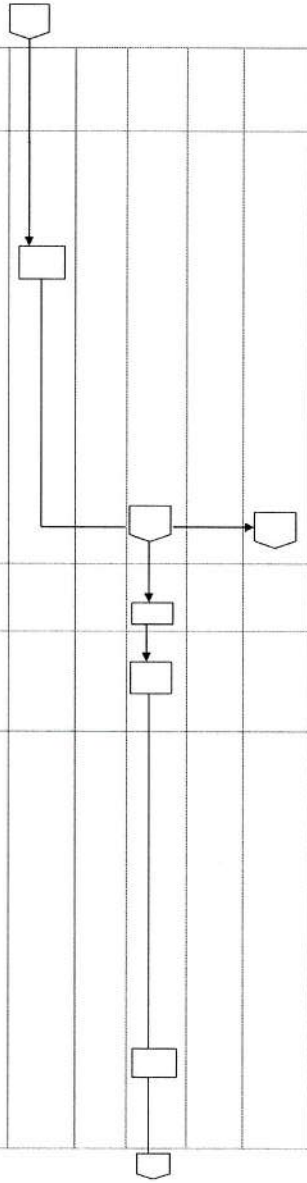

7	-Mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK perkara dalam buku persediaan barang;-Menyimpan bukti-bukti pengembalian ATK perkara,-Melakukan stok opname pada setiap akhir bulan;									10 menit	
Waktu yang dibutuhkan = 125 menit											

E. Kinerja Pelayanan Publik

No.	Hasil Temuan	Tindak Lanjut	Bukti
1	Pada Ruangan Arsip Perkara, ditemukan Berkas Nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm. Putus tanggal 12 April 2022. Minutasi dan Aplaud Putusan pada tanggal yang sama, namun diserahkan ke Petugas Arsip tanggal 27 Mei 2022 (ekspedisi penyerahan berkas ke Petugas Arsip)	Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan berkas perkara Nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm kepada petugas arsip dan berkas telah diarsipkan. Berkas perkara nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm juga telah dialih mediakan serta diupload ke dalam SIPP.	Fisik berkas arsip yang telah disimpan dalam ruang arsip . 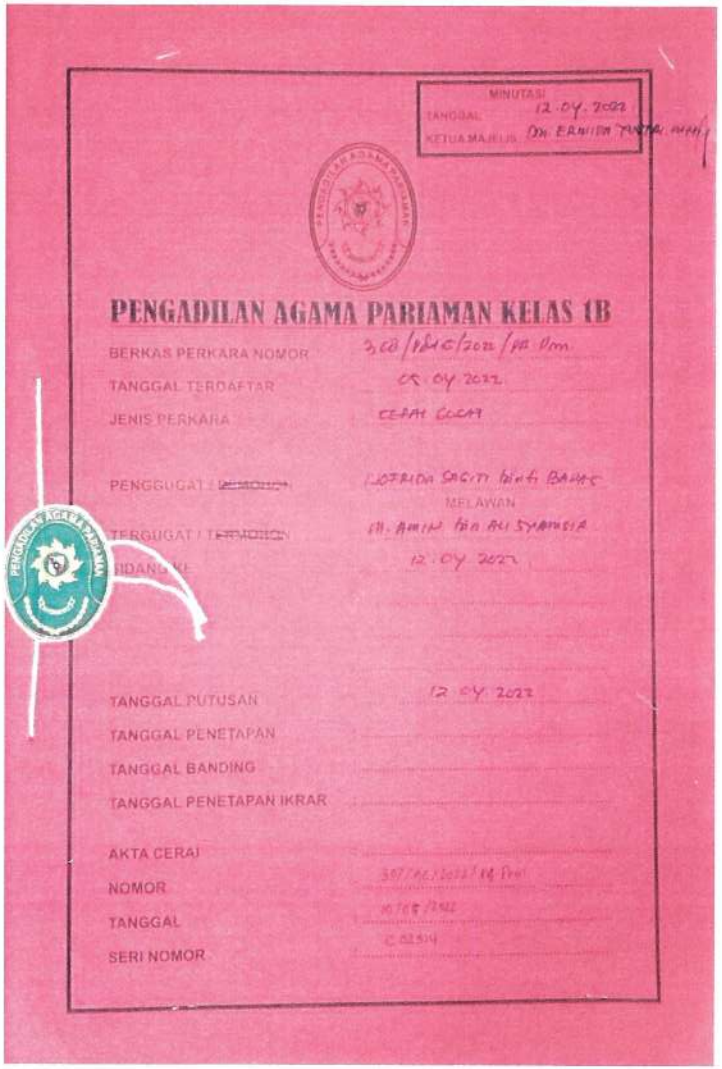

MINUTASI
TANGGAL 12-04-2022
KETUA MAJELIS DR. ERWIDA [illegible]

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS 1B

BERKAS PERKARA NOMOR 368/Pdt.G/2022/PA.Prm
TANGGAL TERDAFTAR 05-04-2022
JENIS PERKARA CERAI GUGAT
PENGGUGAT [illegible] LOTRIDA SAGITI binti BAHAR
MELAWAN
TERGUGAT [illegible] M. AMIN bin ALI SYAHBIA
SIDANG KE 12-04-2022

TANGGAL PUTUSAN 12-04-2022
TANGGAL PENETAPAN
TANGGAL BANDING
TANGGAL PENETAPAN IKRAR

AKTA CERAI
NOMOR 367/AC/2022/PA.Prm
TANGGAL 20/05/2022
SERI NOMOR C 02594

Berkas perkara nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm juga telah dialih mediakan serta diupload ke dalam SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Home | Jurnal Perkara | Register Induk Keuangan | Perdata | Jinayat | Laporan | Jadwal Sidang | Arsip Perk

INFORMASI DETAIL ARSIP

Kembali

Data Arsip | Data Peminjaman

Edit Data Arsip

Nomor Ruang	01
Nomor Rak/Lemari	01
Nomor Tingkat/Laci	04
Nomor Boks	37
Nomor Arsip	368
Nomor Perkara	368/Pdt.G/2022/PA.Prm
Tanggal Masuk	27 Mei 2022
Staff yang Menyerahkan Berkas	RAHMAT HUDAYA, SH
Petugas yang Menerima Berkas	Dasriani
Status	Ada
E-Doc Arsip	[download]
Keterangan	

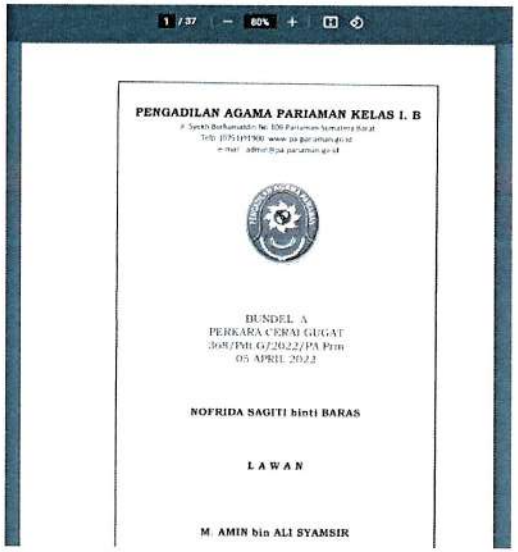

1 / 37 — 80% +

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I. B

BUNDEL A
PERKARA CERAI GUGAT
368/Pdt.G/2022/PA Prm
05 APRIL 2022

NOFRIDA SAGITI binti BARAS

LAWAN

M. AMIN bin ALI SYAMSIR

2	Layanan Pos Bakum - Belum tersedia dengan lengkap Ruang Pelayanan Pos Bakum , kelengkapan Administrasi (seperti Struktur Pos Bakum, instrumen, register kemudian ruangan Pos Bakum masih bergabung dengan gugatan mandiri	Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan administrasi POSBAKUM berupa Struktur POSBAKUM; Instrumen; Buku Register.	Bukti Buku Register POSBAKUM 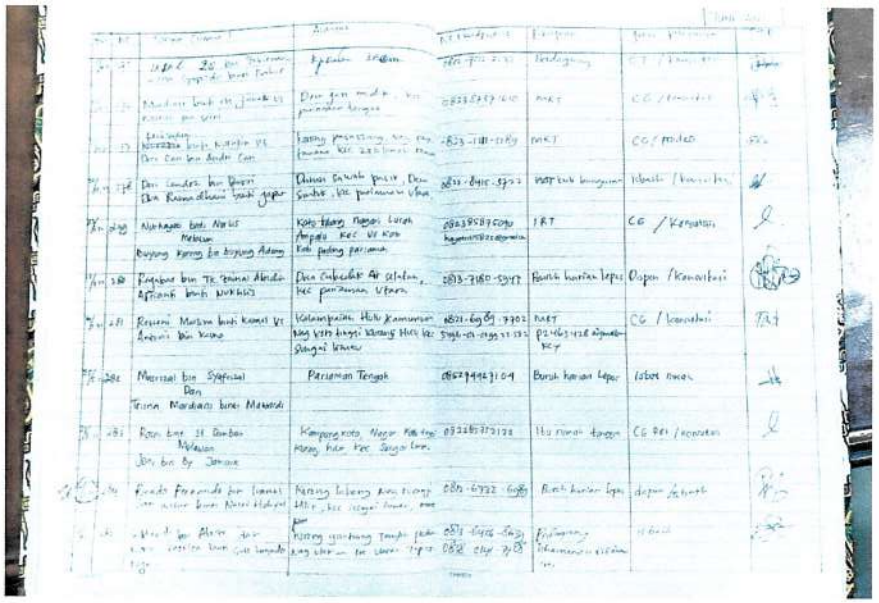 **LAPORAN PERKARA POSBAKUM PENGADILAN AGAMA PARIAMAN** **BULAN MEI TAHUN 2022** **NO** | **Nama Penerima Jasa** | **Tanggal** | **Nama Pemberi Jasa** | **Nama Organisasi Pemberi Jasa** | **Alamat** | **Jenis Jasa Bantuan** | **Umur /Jenis Kelamin** | **Keterangan** 1 | Taufik Hidayat binti Zalmi | 09 Mei 2022 | Nia Marleni, S.H | POSBAKUM Pariaman | Kota Pariaman | Konsultasi | 28 th/ L | Perceraian 2 | Serly Zerli binti Masril | 09 Mei 2022 | Renni Gustiana, S.H | POSBAKUM Pariaman | Kabupaten Padang Pariaman | Konsultasi | 32 th/ P | Perceraian 3 | Gusmayenti binti Nasir | 09 Mei 2022 | Nia Marleni, S.H | POSBAKUM Pariaman | Kota Pariaman | Konsultasi | 29 th/ P | Isbat Comulasi 4 | Monalisa bimi Hendrik Bur | 09 Mei 2022 | Renni Gustiana, S.H | POSBAKUM Pariaman | Kota Pariaman | Konsultasi | 35 th/ P | Perceraian 5 | Taufik Hidayat binti Zalmi | 10 Mei 2022 | Nia Marleni, S.H | POSBAKUM Pariaman | Kota Pariaman | Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak | 28 th/ L | Perceraian

Instrumen POSBAKUM

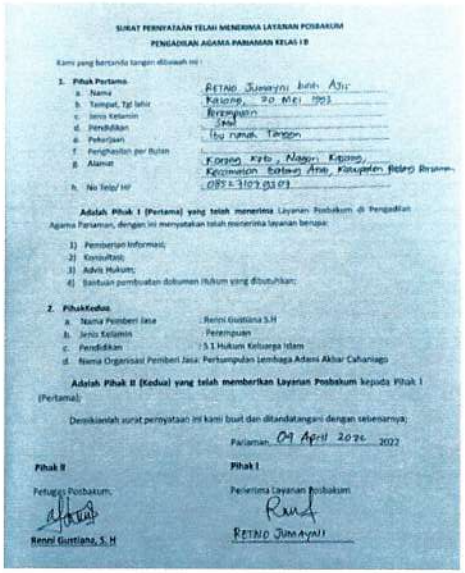

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA LAYANAN POSBAKUM

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Pihak Pertama**
   - a. Nama : RETNO Jumayni binti Aziz
   - b. Tempat, Tgl lahir : Kasang, 20 Mei 1963
   - c. Jenis Kelamin : Perempuan
   - d. Pendidikan : SMA
   - e. Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
   - f. Penghasilan per Bulan :
   - g. Alamat : Korong Kto, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
   - h. No Telp/ HP : 0853 3103 0303

Adalah Pihak I (Pertama) yang telah menerima Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Pariaman, dengan ini menyatakan telah menerima layanan berupa:

1) Pemberian Informasi;
2) Konsultasi;
3) Advis Hukum;
4) Bantuan pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan;

2. **PihakKedua**
   - a. Nama Pemberi Jasa : Renni Gustiana S.H
   - b. Jenis Kelamin : Perempuan
   - c. Pendidikan : S.1 Hukum Keluarga Islam
   - d. Nama Organisasi Pemberi Jasa: Pertumpulan Lembaga Adami Akbar Cahaniago

Adalah Pihak II (Kedua) yang telah memberikan Layanan Posbakum kepada Pihak I (Pertama).

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dan ditandatangani dengan sebenarnya;

Pariaman, 04 April 2024 2022

Pihak II	Pihak I
Petugas Posbakum,	Penerima Layanan Posbakum
Renni Gustiana, S. H	RETNO JUMAYNI

Struktur POSBAKUM

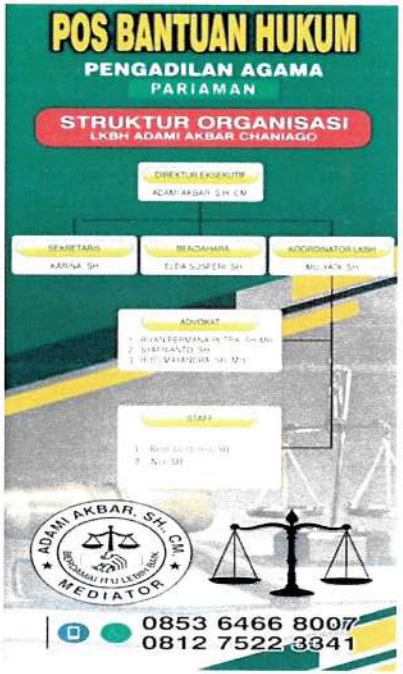

3	Keadaan Ruang Arsip 1. Fisik Berkas pada Ruang Arsip Pisik berkas sudah tertata dengan rapi dalam bok sesuai buku II. Akan tetapi belum punya filling Kabinet (Lemari Arsip) untuk menyimpan arsip; 2. Keadaan Ruang Arsip Ruang arsip sudah rapi dan agar ditingkatkan kebersihannya	Sudah dilakukan pengajuan filling cabinet (Lemari Arsip) dan meningkatkan kebersihan ruang arsip.	Pengajuan filling cabinet (Lemari Arsip). Page view Read aloud Add text Draw Highlight **DAFTAR KEBUTUHAN BMN** **PENGADILAN AGAMA PARIAMAN** **YANG HARUS DIPENUHI** **No** | **Nama BMN** | **Kuantitas** | **Kategori** | **Peruntukan** | **Keterangan** 1 | Lemari Arsip Mobile File System Manual | 5 Buah | Mendesak | Penyimpanan Arsip Perkara | Jumlah perkara sejak tahun 2019 sudah lebih 1000 perkara setiap tahun 2 | Lemari Arsip Kantor | 6 Buah | Mendesak | Penyimpanan Arsip Kesekretarian | Sejak tahun 2015 belum ada pengadaan lemari arsip kesekretariatan 3 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 Unit | Mendesak | Menyimpan daya apabila listik mati secara tiba-tiba untuk server | Tidak pernah memiliki UPS sampai sekarang 4 | Perangkat Server | 1 Unit | Mendesak | Penyimpanan data aplikasi SIPP, E-Court, E-Litigasi dan persidangan | - Ada kerusakan mainboard dan power supply pada server karena pengadaan sever tersebut pada tahun 2015 dan apabila diperbaiki memerlukan biaya perbaikan yang mahal/besar -Tahun 2020 tidak dapat pengadaan server Page view Read aloud Add text Draw Highlight **1. Lemari Arsip** 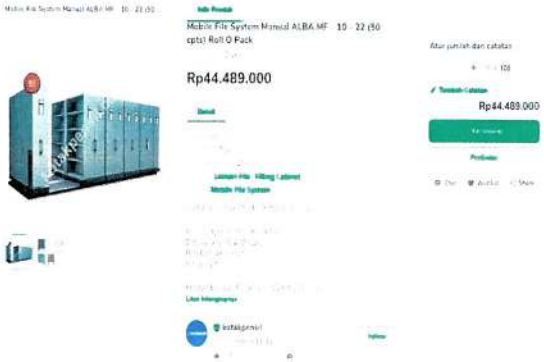

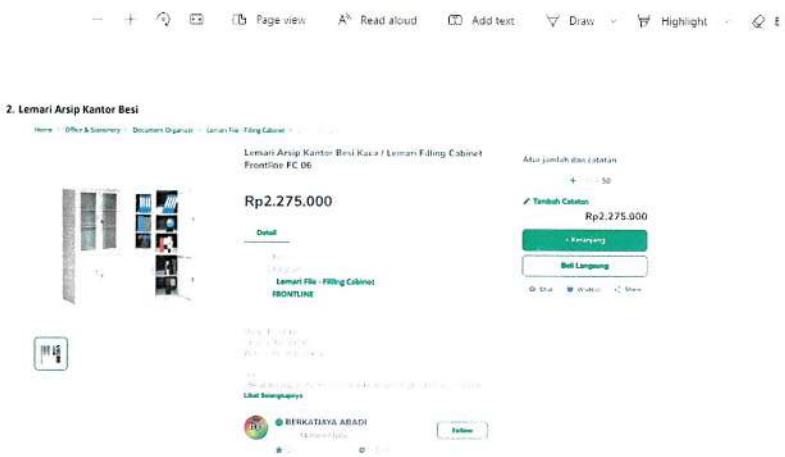

Foto meningkatkan kebersihan ruang arsip.

4	Akta Cerai yang Belum diambil pihak Masih ada Akta Cerai yang telah diterbitkan belum diambil/diserahkan kepada pihak seperti pada tahun 1995 yaitu 49 lembar tahun 1996 59 lembar dan tahun 1997 yaitu 51 lembar dan banyak lagi sampai tahun 2022 dan masih ditemukan E-Doc Akta Cerai yang belum diinput ke SIPP (Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm.)	Sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para pihak yang belum mengambil akta cerai tersebut dan E-Doc Akta cerai perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm sudah diupload ke SIPP	Surat pemberitahuan kepada para pihak yang belum mengambil akta cerai. **PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB** Jl. Sykh Burhanuddin No.106 Kota Pariaman Tlp. (0751)91900 KP.25538 www.pa-pariaman.go.id e-mail pa.pariaman@pta-padang.go.id Nomor : W3-A2/[illegible]/HK.05/VI/2022 Pariaman, 10 Juni 2022 Lampiran : - Perihal : Pemberitahuan Akta Cerai Belum Diambil Kepada **Yth.Sdr. Edison bin Thalib Alibi** Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman Asaalamu'alaikum wr.wb Dengan hormat, kami beritahukan kepada Saudari bahwa suami Saudari atas nama **Liberti binti Burhanuddin Lolek, SH** telah mengajukan cerai talak ke kantor Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor perkara **146/Pdt.G/1994/PA.Prm** dan berstatus putus dikabulkan. Sehubungan dengan hal tersebut, **Akta Cerai** Saudari **Nomor 14/AC/1995/PA.Prm** dapat Saudari ambil di PTSP Pengadilan Agama Pariaman (pada hari/jam kerja) dengan membawa KTP Saudari dan surat ini. Demikian untuk dapat diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam Ketua, Riswan, SH.

Akta cerai para pihak yang belum diambil tetapi sudah disurati.

A. III.3

Nomor : 14 /AC/19 95 /PA . Pm. SERIE D2/93/94

AKTA – CERAI № 0007

(pt. 84 ayat (4) UU No. 7/1989)

Panitera Pengadilan Agama ..... Pariaman ..... menerangkan, bahwa pada hari ini ..... S e l a s a ..... tanggal .. 10 Januari / ..... 1995 .. M, bersamaan dengan tanggal ..... 8 Sya'ban ..... 1415 . H, berdasarkan : . Putusan Pengadilan Agama Pariaman .....

Nomor : . 146/Pdt.G/1994/PA.Pm. ..... tanggal .. 22 Desember .. 19 94 .

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara :

LIBERTI binti BURHANUDDIN LOLEK, SH. , umur .. 27 .. tahun, agama .. I s l a m ... pekerjaan .. Rumah Tangga ..... tempat tinggal di . Marunggi ..... Kecamatan . Pariaman Selatan ..... ~~Kabupaten/Kotamadya~~ Kotif. Pariaman ..,

d e n g a n :

EDISON bin THALIB ALISI , umur . 30 .... tahun, agama .. I s l a m ... pekerjaan . J u a l a n ..... tempat tinggal di . Sumur ..... Kecamatan .. Nan Sabaris ..... Kabupaten/~~Kotamadya~~ . Padang Pariaman .

Demikian dibuat akta cerai ini, ditanda tangani oleh kami ..... A l i ..... U m a r ..... Panitera Pengadilan Agama ..... P a r i a m a n .....

Panitera ,

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

(ALI UMAR)

			Screenshoot E-Doc Akta cerai perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm sudah diupload ke SIPP.